

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SEKITAR NEGARA PASUNDAN 1947

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Yohanes Edi Sunarya

NIM : 86 214 023

NIRM : 86 5027200020

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1991**

S k r i p s i

Sekitar Negara Pasundan 1947

Oleh

Yohanes Edi Sunarya

NIM : 86 214 023

NIRM : 86 5027200020

telah disetujui oleh :

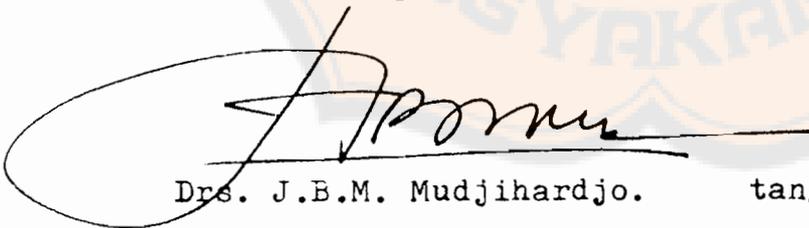
Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

tanggal ^{16/10} - 1991

Pembimbing II



Drs. J.B.M. Mudjihardjo.

tanggal ^{23/10} - 1991

SKRIPSI

SEKITAR NEGARA PASUNDAN 1947

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Yohanes Edi Sunarya

NIM : 86 214023

NIRM : 86 5027200020

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 23 November 1991
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama lengkap

Tanda Tangan

Ketua : Drs. G. Moedjanto, M.A.

Sekretaris: Drs. J. Markiswo

Anggota : Drs. J.B.M.Mudjihardjo

Drs. J.R. Adisusilo

Yogyakarta,

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FKIP Sanata Dharma

Dekan



G. Moedjanto, M.A.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan program studi Pendidikan Sejarah pada FPIPS IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

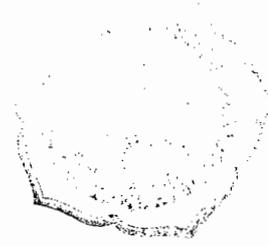
Terselesaikannya skripsi ini berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A., dosen Pembimbing I.
2. Bapak Drs. J.B.M. Mudjihardjo, dosen Pembimbing II.
3. Para pimpinan dan staff di Perpustakaan IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, Perpustakaan Angkatan Darat di Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Pajajaran di Bandung, Perpustakaan Pusat Sejarah ABRI di Jakarta, Perpustakaan Nasional di Jakarta dan Arsip Nasional di Jakarta.
4. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak mungkin dapat penulis sebutkan satu-satunya.

Tentu saja skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penulisan	15
BAB II. LATAR BELAKANG MUNCULNYA NEGARA PASUNDAN 1947	16
A. Pergolakan Rakyat di Jawa Barat	16
B. Jawa Barat Setelah Sekutu Datang	21
C. Perundingan Antara Indonesia dengan Belanda	26
BAB III. NEGARA PASUNDAN 1947	34
A. Partai Rakyat Pasundan	34
B. Proklamasi Negara Pasundan 1947	42
BAB IV. AKHIR DARI NEGARA PASUNDAN 1947	50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Halaman
A. Reaksi Terhadap Proklamasi Negara Pasundan 1947	50
B. Aksi Partai Rakyat Pasundan di Bogor..	59
C. Sekitar Pembentukan Negara Pasundan Tahun 1948	66
BAB V. KESIMPULAN	73
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Bentuk negara kesatuan paling cocok bagi Indonesia. Bukan berarti bentuk negara Indonesia belum pernah diubah sejak ditetapkan. Bentuk negara kesatuan pernah dikorbankan dalam perjuangan melawan Belanda, diganti dengan bentuk federasi yaitu dengan terbentuknya RIS, karena bentuk itu yang dikehendaki Belanda.

Untuk mewujudkan negara RIS Belanda berusaha mendirikan negara-negara bagian. Usaha itu dimulai dengan pembentukan Negara Indonesia Timur, daerah-daerah otonom di Kalimantan, Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur dan lain-lain. Di Jawa Barat sebelum negara Pasundan 1948 dengan wali negara Wiranatakusumah terbentuk, sudah ada usaha untuk mendirikan Negara Pasundan pada tahun 1947 yang dilakukan oleh Suria Kartalegawa. Negara itu yang dimaksud dalam skripsi ini.

Permasalahan utama adalah bagaimana keberadaan Negara Pasundan 1947. Permasalahan itu dibagi lagi dalam bagaimana latar belakang, bagaimana munculnya, dan bagaimana akhir dari Negara Pasundan 1947.

Tujuan penulisan untuk mengetahui keberadaan Negara Pasundan 1947, latar belakang, proses munculnya dan berakhirnya.

Untuk mengupas permasalahan di atas digunakan metode deskriptif-analitis dengan menimba sumber-sumber kepustakaan yang tersedia. Sedangkan langkahnya mengikuti langkah-langkah yang diusulkan oleh Louis Gottschalk yaitu pemilihan subyek untuk diselidiki, menemukan sumber, kritik sumber, analisis, sintesis, koroborasi, interpretasi, dan akhirnya penulisan laporan sejarah.

Ketika berlangsung revolusi nasional, di beberapa daerah terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial atau pergolakan daerah di Jawa Barat terjadi di Banten, Karawang, Tangerang, dan Cirebon. Pergolakan itu membuat situasi Jawa Barat pada awal kemerdekaan menjadi kacau.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah Jepang kalah dalam PD II, tentara Inggris dari Divisi India ke-23 mengambil alih kekuasaan Jawa Barat dari Jepang. Masuknya tentara Inggris ini diikuti oleh tentara Belanda. Inggris berhasil menguasai jalur Jakarta-Bogor-Bandung. Setelah tugas tentara Inggris berakhir maka daerah yang dikuasainya diserahkan kepada Belanda.

Pada akhir tahun 1946 antara Indonesia dan Belanda berhasil merumuskan Perjanjian Linggajati, yang berisi antara lain pengakuan de facto atas Republik dan pembentukan Negara RIS.

Suria Kartalegawa bekas bupati Garut, pada tanggal 20 Mei 1946 mendirikan Partai Rakyat Pasundan dan pada 4 Mei 1947 memproklamkan berdirinya Negara Pasundan. Proklamasi itu mendapat reaksi yang hebat baik dari rakyat Jawa Barat, Pemerintah Indonesia, bahkan keluarganya sendiri. Pada 23 Mei 1947 Partai Rakyat Pasundan merebut kekuasaan di Bogor.

Negara Pasundan pimpinan Suria Kartalegawa itu tidak dapat berkembang, maka Belanda kemudian berusaha mendirikan Negara Pasundan yang baru. Usaha itu berhasil dengan berdirinya Negara Pasundan pada bulan Februari - 1948 dengan wali negara Wiranatakusumah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada masa Revolusi Indonesia 1945 - 1949 ada dua pendapat yang bertentangan mengenai cara perjuangan yaitu diplomasi, dengan jalan damai dan berunding, ataukah dengan kekuatan senjata. Selain itu muncul lagi dilema harus mempertahankan negara kesatuan ataukah mengikuti usaha Belanda yaitu membentuk negara federal agar perjuangan bisa berhasil. Akhirnya pemerintah Indonesia memilih bentuk federalif dalam usaha memenangkan konflik politik Indonesia-Belanda tersebut.

Usaha Belanda untuk membentuk negara federatif menjadi nyata dengan dimulainya mendirikan Negara Indonesia Timur, daerah-daerah otonom di Bangka, Belitung, Riau, Negara Pasundan (1948); Jawa Timur (1948); Sumatra Timur (1949), dan Sumatra Selatan (1949).

Namun sebelum terbentuk Negara Pasundan 1948 yang kemudian menjadi Negara Jawa Barat dengan Wali Negara Wiranatakusumah, terlebih dahulu sudah ada usaha untuk mendirikan Negara Pasundan pada tahun 1947 yang diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa atas nama Partai Rakyat Pasundan, negara inilah yang dimaksud dalam tulisan ini.

Negara Pasundan tahun 1947 belum banyak ditulis secara khusus, tetapi dapat dikenal dari buku tulisan A.H. Nasution yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan, Episode Periode Linggajati. Persoalan ini disinggung dalam hubungannya dengan situasi yang ada di daerah pada masa Perjanjian Linggajati. Dalam skripsi yang ditulis oleh Tanu Suherly dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran berjudul Negara Pasundan 1948 disinggung pula mengenai Negara Pasundan 1947. Maka dari itu tulisan ini berusaha mengungkapkan secara lebih jelas mengenai Negara Pasundan tahun 1947.

Usaha pembentukan Negara Pasundan di Jawa Barat, yang sebenarnya Jawa Barat adalah wilayah Republik Indonesia, jelas merupakan usaha melawan pemerintah yang sah. Menurut David V.J. Bell dalam bukunya Resistance and Revolution, perlawanan dalam suatu negeri (internal war) mengandung unsur kekerasan; perlawanan itu terorganisasi dengan dukungan masyarakat yang luas dan bermaksud menggulingkan sistem yang ada dengan mengubah politik dan pemerintahannya.¹ Internal war ini terbagi lagi dalam: (1) revolusi kelas (class revolution), (2) perang saudara (civil war), (3) gerakan pemisahan (war of secession), dan (4) perang kemerdekaan (war of liberation).

¹David V.J. Bell, Resistance and Revolution (Boston: Houghton Mifflin Company, 1973), h. 110-139.

Kasus Negara Pasundan ini lebih cenderung digolongkan sebagai suatu gerakan pemisahan, suatu bagian daerah mencoba memisahkan diri dari yang lain untuk berdiri sendiri, tidak berada di bawah kekuasaan yang lebih tinggi.² Kegiatan yang dilakukan pertama-tama secara sembunyi-sembunyi dan kemudian dengan pemberontakan secara terbuka, yang pertama menyiapkan jalan bagi yang kedua.³ Anggotanya terdiri dari golongan elite daerah itu dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Hal itu dapat tumbuh karena ada kekuatan dari golongan elite di daerah itu untuk menentang suatu kesatuan nasional. Jika perlawanan itu berhasil akan tercipta suatu negara baru yang berdiri sendiri, tetapi bila tidak berhasil daerah itu akan kembali menjadi bagian seperti semula.

Bersatunya golongan elite dan pengikutnya akan membentuk suatu gerakan massa. Menurut Eric Hoffer orang tertarik gerakan massa karena beberapa sebab pertama, menginginkan suatu perubahan keadaan masa kini, rasa bosan, dan kekecewaan; kedua, keinginan adanya pengganti, dan pandangan bahwa masa depan memberi janji-janji yang lebih baik.⁴ Sedangkan calon anggotanya adalah kaum tersingkir, kaum miskin, minoritas, orang bosan, dan

²Ibid., h. 112.

³Maurice Douverger, Sosiologi Politik (Jakarta : Rajawali, 1982), h. 279.

⁴Eric Hoffer, Gerakan Massa (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 3 - 16.

orang yang mementingkan diri-sendiri.⁵

Jawa Barat pada mulanya dikenal dengan nama Tanah Sunda atau Pasundan, yaitu suatu istilah untuk menyebut bagian dari Pulau Jawa yang terletak di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citandui. Penduduknya memiliki bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat sendiri, yaitu Sunda. Pulau Jawa berdasar pembagian kebudayaan dan bahasa terbagi menjadi dua bagian yaitu Tanah Sunda dan Tanah Jawa. Pembagian ini tercermin pula dalam berita pantun Ciung Wanara.⁶ Menurut cerita itu Pulau Jawa dibagi menjadi dua bagian dengan Sungai Pamali sebagai pembatas, bagian barat milik Ciung Wanara yang merupakan orang Sunda dan mempunyai kebudayaan pantun serta bahasa Sunda, sedangkan bagian Timur milik Aria Banga, orang Jawa yang memiliki kebudayaan tembang dan bahasa Jawa.

Memasuki abad ke-20, yaitu masa tumbuhnya pergerakan nasional, di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo di lingkungan Sekolah Dokter Jawa, Stovia (School tot Opleiding van Indische Artsen). Pada perkembangan Budi Utomo selanjutnya terdapat ketidakcocokan di antara anggotanya, yaitu beberapa siswa Stovia asal Sunda antara lain R. Djoendjoenan dan R. Koesoema Soedjana. Ketidakcocokan ini menyebabkan mereka meninggalkan Budi Utomo dan mengembangkan gagasan men-

⁵Ibid., h. 26.

⁶Ma'mun Atmamihardja, Sedjarah Sunda, jilid I (Bandung : Ganaco, 1958), h. 78-80.

dirikan suatu organisasi baru untuk memajukan rakyat yaitu Paguyuban Pasundan. Pada tanggal 22 September 1914 lahirlah Paguyuban Pasundan yang dianggap sah sebagai badan hukum dalam tata hukum Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Pemerintah tanggal 9 Desember 1914, nomor 46.⁷

Tujuan perkumpulan ini adalah :

Memajukan orang-orang Sunda, agar supaya bertambah keselamatannya, dengan jalan akan berikhtiar memajukan kecerdasannya dan penghidupan, serta memperbaiki tingkah lakunya, yaitu dengan pengajaran di rumah dan di sekolah, selain itu akan memperluas pikirannya, dengan harapan agar supaya bertambah kekuatannya, akhirnya bertambah senang penghidupannya.⁸

Sesuai dengan cita-cita perjuangannya, maka setelah Jawa Barat terbentuk yang diundangkan dalam Staatblad tahun 1925 nomor 378, Paguyuban Pasundan mengusulkan kepada pemerintah agar secara resmi nama West Java diganti dengan Pasundan dan kota Bandung sebagai ibukota propinsi. Propinsi ini meliputi wilayah lima karesidenan yaitu Banten, Batavia, Bogor, Priangan dan Cirebon. Kegiatan Paguyuban Pasundan terhenti pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Jawa Barat menjadi propinsi pertama dalam urutan propinsi - propinsi di Indonesia. Propinsi Jawa Barat dibagi menjadi lima karesidenan : Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cire-

⁷Sejarah Daerah Jawa Barat Suatu Tanggapan dan Pembahasan (Bandung: Pemerintah Daerah Jawa Barat, 1972), h.196.

⁸Ibid.

bon. Karesidenan Banten meliputi Kabupaten-kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Karesidenan Jakarta meliputi kabupaten-kabupaten Jakarta, Jatinegara, Krawang, dan kota otonom Jakarta. Karesidenan Bogor meliputi kabupaten-kabupaten: Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan kota otonom Bogor. Karesidenan Priangan meliputi kabupaten-kabupaten: Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan kota otonom Bandung. Karesidenan Cirebon meliputi kabupaten-kabupaten: Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan kota otonom Cirebon.⁹

Untuk mempertahankan kemerdekaan Presiden Sukarno melalui Radio Republik Indonesia mengumumkan agar tiap karesidenan dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), anggotanya diambil dari bekas prajurit Peta, Heiho, dan pemuda. Pada tanggal 25 Agustus di Bandung diadakan rapat untuk menyusun BKR Jawa Barat yang dipimpin Otto Iskandardinata. Rapat ini membagi tugas menyusun BKR di Jawa Barat dengan hasil sebagai berikut: untuk Jakarta Kasman Singodimejo, untuk Priangan Sutalaksana dan Aruji Kartawinata, untuk Bogor Gunawan, dan untuk Cirebon A. Gani. Di samping BKR banyak pula didirikan organisasi kelasykaran.

Setelah kapitulasi Jepang ditandatangani di atas

⁹Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam The Liang Gie, Kumpulan Pembahasan terhadap Undang - Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia (Yogyakarta: Karya Kencana, 1977), h. 23.

kapal Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, 2 September 1945, dengan segera tentara Sekutu bertolak ke Indonesia. Pada tanggal 8 September 1945 untuk pertama kalinya Sekutu mengirim tim penyelidik khusus yang terdiri dari tujuh perwira Inggris di bawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh yang kemudian membuka markas besarnya di hotel Des Indes. Tim itu diberi nama Allied Mission yang bertugas memberi laporan mengenai hasil penyelidikan di Jakarta. Pada tanggal 16 September 1945 di Jakarta mendarat armada kecil Sekutu yang terdiri dari kapal penjelajah Cumberland dan Tromp, serta kapal lain yang mengangkut detasemen marinir. Dalam rombongan ini terdapat W.R. Patterson wakil Panglima Sekutu Komando Asia Tenggara disertai opsir-opsir Belanda antara lain: Jendral Van der Strated, Kolonel Abdulkadir, dan Dr. Ch. Van der Plas yang menjadi wakil dari Dr. H.J. van Mook, kepala NICA (Netherlands Indies Civil Administration).

Tidak dapat disangkal bahwa tujuan Pemerintah Belanda ialah untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di wilayah Hindia Belanda sesudah perang Pasifik. Dengan berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina dari London tanggal 7 Desember 1942, Pemerintah Belanda sudah merasa cukup mempunyai landasan untuk mengadakan sekedar perubahan-perubahan politik di Indonesia yang akan dibicarakan dalam suatu Konferensi Kerajaan.¹⁰ Tugas ini dibebankan

¹⁰Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 2.

kepada van Mook sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akan tetapi situasi politik Indonesia sangat berlainan dengan yang dibayangkan van Mook, Republik Indonesia telah berdiri.

Dasar hukum tata negara dari tertib kenegaraan yang akan datang menjadi hakekat perselisihan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia.¹¹ Van Mook mengusulkan supaya Pemerintah Belanda beralih kepada susunan kenegaraan federal, sementara Republik berusaha untuk mempertahankan negara kesatuan. Kedua pihak berusaha menyelesaikan pertentangan lewat perundingan-perundingan. Konferensi Hoge Veluwe yang dilaksanakan di Negeri Belanda tanggal 14-24 April 1946 tidak membuahkan hasil. Akhirnya pada bulan Nopember 1946 dilangsungkan perundingan di Linggarjati. Perundingan ini membuahkan persetujuan yang pada pokoknya berisi : pengakuan de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatra serta akan dibentuk Negara Indonesia Serikat. Persetujuan Linggarjati bertitik tolak dari pendirian bahwa tertib kenegaraan didasarkan atas landasan federal Negara Indonesia Serikat.

Sementara itu setelah kegagalan perundingan Hoge Veluwe, van Mook mengalihkan perhatian ke luar Jawa dan Sumatra. Bersama dengan pemimpin-pemimpin Timur Besar (Indonesia Timur) dan Kalimantan mengadakan konferensi

¹¹Ide Anak Agung Gde Agung, Renville (Jakarta : Sinar Harapan, 1983), h. 12.

di Malino untuk mempersiapkan terwujudnya ketatanegaraan federatif yang berlangsung dari tanggal 15 - 25 Juli 1946. Konferensi Malino kemudian disusul dengan Konferensi Denpasar pada tanggal 18 - 24 Desember 1946, yang diakhiri dengan diumumkannya berdirinya Negara Indonesia Timur.¹² Setelah berdirinya Negara Indonesia Timur maka Pemerintah Hindia Belanda mendirikan daerah-daerah otonom di Kalimantan, Bangka, Riau, dan Belitung, kemudian membantu pendirian Negara Pasundan, Jawa Timur, Sumatra Timur, Sumatra Selatan, dan daerah otonom Jawa Tengah.

Selama usaha penyelesaian secara perundingan Belanda juga meningkatkan kekuatan militernya yang kemudian mengganti kedudukan-kedudukan Sekutu. Oleh karena itu Jawa Barat pada jalur Jakarta, Bogor, dan Bandung telah dikuasai Belanda, sedangkan kekuatan-kekuatan Republik terpaksa mundur.

Sementara itu pada tanggal 20 Nopember 1946 Suria Kartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan yang kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947 di Bandung. Usaha Kartalegawa ini tentu saja didukung oleh penguasa Belanda di daerah itu. Namun Negara Pasundan ini tidak berkembang, baru setelah agresi militer Belanda pertama Negara Pasundan secara nyata terwujud.

¹²Ibid., h. 170.

B. Perumusan Masalah

Masalah dalam skripsi ini digolongkan dalam dua bagian yaitu masalah umum dan masalah khusus. Masalah umumnya adalah bagaimana keberadaan Negara Pasundan 1947? Masalah khusus terdiri dari tiga bagian, tiap bagian membentuk satu - kesatuan bab, tiap bagian akan dibagi lagi yang akan membentuk sub-bab. Masalah pertama Apa latar belakang munculnya Negara Pasundan? Kemudian dibagi lagi dalam masalah kecil yaitu mengapa terjadi pergolakan daerah di Jawa Barat setelah Proklamasi kemerdekaan RI; bagaimana situasi Jawa Barat setelah sekutu datang? Bagaimana perundingan antara RI dengan Belanda? Kedua, bagaimana munculnya Negara Pasundan 1947? Kemudian dibagi dalam masalah yang lebih kecil yaitu bagaimana muncul dan perkembangan Partai Rakyat Pasundan? Bagaimana proklamasi Negara Pasundan dilaksanakan? Ke-tiga, bagaimana akhir dari Negara Pasundan? Kemudian dibagi dalam bagaimana reaksi atas berdirinya Negara Pasundan? Bagaimana aksi Partai Rakyat Pasundan di Bogor? Bagaimana nasib Partai Rakyat Pasundan dan Negara Pasundan dengan berdirinya Negara Pasundan baru (1948)?

Dengan menjawab masalah-masalah khusus tersebut di atas diharapkan didapat deskripsi tentang Negara Pasundan tahun 1947.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan umum adalah untuk mengetahui keberadaan Negara Pasundan 1947. Tujuan khusus pertama untuk mengetahui latar belakang munculnya Negara Pasundan 1947; kedua mengetahui bagaimana munculnya Negara Pasundan 1947, dan ketiga mengetahui akhir dari Negara Pasundan 1947.

D. Manfaat Penulisan

Bagi IKIP Sanata Dharma penulisan skripsi ini bermanfaat untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi dunia ilmu pengetahuan penulisan skripsi ini akan menambah khasanah pengetahuan tentang sejarah nasional Indonesia. Bagi peneliti berguna untuk memperdalam pengetahuan sejarah Indonesia dan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang Negara Pasundan 1947 masih terbatas. Pembahasan yang ada hanya menyinggung beberapa bagian saja. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang Negara Pasundan 1947 perlu diperhatikan faktor-faktor yang menyertainya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di beberapa daerah terjadi pergolakan-pergolakan atau revolusi sosial. Revolusi sosial yang muncul dalam

masa revolusi nasional tersebut juga terjadi di Jawa Barat. Untuk mengkaji pergolakan daerah di Jawa Barat, sumber-sumber yang digunakan adalah Audrey R. Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal Revolusi, 1990; Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi Dalam Revolusi, 1989; William H. Frederick & Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi, 1982; A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 1978.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka wilayah Hindia Belanda harus diserahkan kepada Sekutu. Tetapi sebelum Sekutu datang terjadilah "vacuum of power", kesempatan ini digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Civil Affairs Agreement, maka yang berhak "mengamankan" Indonesia adalah Inggris. Maka pada tanggal 15 September 1945 Tentara Inggris yang mana terdapat tentara Hindia, mendarat di Jakarta. Namun kedatangan Sekutu yang diwakili Inggris ini diboncengi NICA yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Untuk mewujudkan keinginannya maka Belanda menguasai daerah-daerah penting di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Munculnya Negara Pasundan tak dapat dipisahkan dengan keadaan Jawa Barat yang telah dikuasai Sekutu yang kemudian dioper oleh Belanda. Untuk membahas keadaan Jawa Barat setelah Sekutu datang dapat ditimba sumber-sumber seperti: John R.W. Smail, Bandung in the Early Revolution 1945-1946; 1964; Djajusman, Bandung Lautan Api, 1986; Nasution,

Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1, 1982; Pemerintah Daerah Jawa Barat, Sejarah Jawa Barat Suatu Tanggapan dan Pembahasan, 1972; Kementrian Penerangan, Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat, 1953.

Ambisi Belanda untuk berkuasa akhirnya berbenturan dengan kekuatan Republik Indonesia yang sudah memerdekakan diri. Perbenturan kepentingan ini menyebabkan terjadinya pertempuran-pertempuran terbuka, namun selain itu kedua pihak juga mengadakan perundingan-perundingan. Persetujuan pertama yang dihasilkan adalah Persetujuan Linggajati. Hasil perundingan ini sangat berpengaruh terhadap munculnya Negara Pasundan. Untuk membahas perundingan Indonesia-Belanda ditimba sumber-sumber dari K.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati, 1986; George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, 1970, khususnya bab VI; Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni, 1990; C. Smit Dekolonisasi Indonesia, 1986; Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, 1985; Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, 1983.

Munculnya Negara Pasundan 1947 dirintis oleh Partai Rakyat Pasundan. Dengan demikian perlu dikupas seluk beluk mengenai Partai Rakyat Pasundan, yaitu berdirinya, perkembangannya, dan pelaksanaan proklamasi Negara Pasundan. Untuk keperluan ini digunakan sumber-sumber : Pengurus Besar Partai Rakyat Pasundan, Tujuan Partai

Rakyat Pasundan, 1948; A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 4, 1975; Lindayanti, Jawa Barat Setelah Perjanjian Linggajati, Skripsi Fakultas Sastra UGM, 1984; media massa seperti: Berita Indonesia, Rakjat, Kemajuan Rakjat, Merdeka, Suluh Rakjat, dan Masyarakat.

Munculnya Negara Pasundan yang diproklamasikan Suria Kartalegawa menimbulkan reaksi yang hebat, baik dari rakyat Jawa Barat sendiri maupun dari Pemerintah Republik Indonesia. Reaksi tersebut membuat Partai Rakyat Pasundan terjepit. Tindakan berikutnya yang diambil Partai Rakyat Pasundan adalah melakukan aksi yaitu pengambilalihan Pemerintahan Republik di Bogor. Negara Pasundan pimpinan Kartalegawa ini tidak dapat berkembang, oleh sebab itu van Mook berusaha mendirikan Negara Pasundan baru lewat Konferensi Jawa Barat sampai tiga kali. Dalam Negara Pasundan yang baru ini Partai Rakyat Pasundan hanya merupakan fraksi kecil dalam parlemen Pasundan. Untuk membahas ketiga hal tersebut di atas akan dikaji sumber-sumber dari: Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 4, 1975; Sewaka, Tjorat Tjaret dari Djaman ke Djaman, 1955; Ariwiadi, "A Putsch by the Pasundan Peoples Party in Bogor on May 23 1947 dalam International Association of Asia, 1974; J.M.A. Tuhuteru, Riwayat Singkat Berdirinya Negara Pasundan, (tt); A. Arthur Sciller, The Formation of Federal Indonesia 1945-1950, 1955; Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, 1983

khususnya bab V; Tanu Suherly, Negara Pasundan 1948, Skripsi Fakultas Sastra UNPAD, 1968.

F. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah deskriptif-analitis dengan menimba sumber-sumber kepustakaan yang tersedia dan melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu Bapak Sukanda Bratamanggala anggota TRI pada masa revolusi yang bertugas di sekitar Bandung dan mantan Ketua Paguyuban Pasundan.

Adapun langkah-langkahnya seperti yang diusulkan oleh Louis Gottschalk sebagai berikut:¹³ (1) Pemilihan subyek untuk diselidiki; (2) menemukan sumber selengkap-lengkapannya; (3) mengadakan kritik sumber dengan tujuan menguji otensitas dengan kritik ekstern dan intern; (4) Analisis sumber keterangan; (5) Sintesis sumber keterangan dari berbagai sumber untuk diperbandingkan; (6) Koroborasi, membandingkan dengan sumber lain yang otentik; (7) Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber lain yang diperoleh; (8) penulisan laporan sejarah.

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan, rumusan masalah, sumber-sumber yang digunakan serta metode penulisan, maka dalam bab berikut akan dibahas latar belakang munculnya Negara Pasundan 1947.

¹³Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), h. 34.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LATAR BELAKANG MUNCULNYA NEGARA PASUNDAN 1947

A. Pergolakan Rakyat di Jawa Barat

Ketika Jepang menyerah bangsa Indonesia sudah matang untuk memulai dua revolusi. Satu di antaranya adalah revolusi nasional yang dicetuskan dalam proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta yang diwakili oleh Sukarno dan Hatta. Menyusul proklamasi itu adalah serangkaian tindakan yang tergesa-gesa dalam mendirikan sebuah negara Republik. PPKI mengesahkan sebuah UUD serta memilih Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakil Presiden. PPKI kemudian mengubah dirinya menjadi KNIP. Pemerintah baru segera bertugas antara lain membagi wilayah Indonesia menjadi delapan propinsi, mengangkat gubernur untuk setiap propinsi, dan memberikan instruksi mengenai pemerintahan di luar Jakarta.¹

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan di Jawa Barat maka dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BPKNI). Propinsi Jawa Barat dibagi menjadi lima karesidenan yaitu Banten, Jakarta, Priangan, Bogor, dan Cirebon, kemudian dibagi lagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota otonom. Guna melengkapi struktur pemerintahan da-

¹Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1990, h. 7.

erah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Pejabat kepala daerah pada umumnya ditunjuk oleh KNIP. Sebagian besar dari mereka yang ditunjuk ada juga yang telah menduduki jabatan itu pada masa pemerintahan Jepang. Pada tanggal 1 September 1945 R. Puradireja ditunjuk sebagai residen Priangan, Tirta Suyatna sebagai residen Banten, R. Ijok Mohammad Sirods sebagai residen Bogor, Sewaka sebagai residen Jakarta, dan dokter Murjani sebagai residen Cirebon.

Seiring berlangsungnya revolusi nasional, di beberapa daerah terjadi revolusi sosial.² Perjalanan revolusi Indonesia ditandai pergulatan terus-menerus antara kepentingan negara dan kepentingan daerah.³ Kepentingan negara diwakili oleh otoritas pusat yang secara representatif ingin mendesak dominasi dan hegemoninya atas daerah, sedangkan daerah melambangkan kepentingan bangsa yang secara partisipatoris menuntut otonomi. Kendati keduanya menghendaki Indonesia merdeka namun pembenturan kepentingan tak dapat dielakkan lagi. Pergolakan daerah yang merupakan satu bentuk revolusi sosial ini ditandai oleh berbagai bentuk kekerasan, penganiayaan, pembunuhan

²Yang disebut revolusi nasional adalah revolusi untuk mengubah tata kehidupan kolonial/feodal ke tata kehidupan nasional yang merdeka. Revolusi sosial adalah revolusi untuk mengubah struktur masyarakat kolonial/feodal kepada suatu susunan masyarakat yang lebih demokratis. Lihat William H. Frederick & Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi (Jakarta : LP3ES, 1982), h. 312.

³Ibid.

an, penculikan, perampokan, dan pengambilalihan kekuasaan.⁴ Pergolakan daerah di Jawa Barat terjadi di daerah Banten, Krawang, Tangerang, dan Cirebon.⁵

Tiga benang merah menjelajahi sejarah Banten selama revolusi Indonesia. Secara ringkas benang ini dapat diidentifikasi sebagai regionalisme, anti-kolonialisme, dan revolusi sosial.⁶ Unsur kedaerahan yang kuat termanifestasikan dalam ketidakpercayaannya kepada pemerintah pusat dan keinginannya mendapatkan otonomi. Anti-kolonialisme terus diusahakan sehingga sampai tahun 1948 Banten tidak pernah ditaklukkan Belanda dan Banten tidak dapat ditarik ke dalam proyek federalisme Belanda. Sedangkan revolusi sosial terungkap dalam penggulingan pemerintah yang lama dengan berdirinya "Dewan Rakyat". Revolusi di Banten terjadi berkat koalisi longgar tiga unsur: para ulama, kaum komunis setempat, dan para jawara.⁷

Pada masa pendudukan Belanda kaum ulama Banten tidak mendapatkan tempat dalam kepemimpinan daerah itu.

⁴Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah (Revolusi Dalam Revolusi) (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. ix-xii.

⁵William H. Frederick & Soeri Soeroto, op. cit., h. 318.

⁶Audrey R. Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal Revolusi (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1990), h. 60.

⁷Ibid., h. 61, B.R.OG. Anderson, Java in Time of Revolution (Inhaca : Cornell Up, 1972), h. 336.

Pamong praja dan polisi umumnya terdiri dari orang-orang dari luar Banten, terutama Priangan.⁸ Hal itu menimbulkan isu penjajahan Priangan atas Banten. Pada masa Jepang kaum ulama mulai diberi tempat, misalnya saja Kyai Ahmad Khatib menjadi Daidanco di Banten. Setelah Jepang meninggalkan Banten maka kaum ulama berusaha merebut kekuasaan. Pada tanggal 6 Oktober 1945 sebuah rapat umum yang dihadiri beberapa ribu orang di Serang memilih Kyai Ahmad Khatib sebagai residen; dengan demikian menggulingkan Tirta Suyatna residen yang diangkat oleh RI. Beberapa hari berikutnya pemerintah setempat dan kegiatan polisi di daerah itu hampir hancur sama sekali. Di seluruh karesidenan semua pangreh praja, dari asisten residen sampai bupati, diganti oleh kaum ulama.⁹

Kaum komunis setempat tidak menentang pemilihan kaum ulama untuk mengisi jabatan-jabatan resmi agar koalisi tidak terpecah. Sebagai gantinya mereka membentuk Dewan Rakyat, yang pada awalnya adalah KNI pimpinan Ce Mamat yang berada di Serang. Dewan Rakyat diharapkan sebagai pemegang kekuasaan politik yang sesungguhnya di

⁸William H. Frederick & Soeri Soeroto, op. cit., h. 319. Daerah Priangan adalah pusat pemerintahan daerah Jawa Barat, penduduk Jawa Barat umumnya adalah suku Sunda dengan daerah intinya Priangan, lihat dalam Republik Indonesia Propinsi Djawa Barat (Jakarta : Kementrian Penerangan Republik Indonesia, 1953), h. 31.

⁹Audrey R. Kahin, op. cit., h. 70.

samping Residen Ahmad Khatib. Dewan itu berada di bawah pengaruh kuat bekas-bekas kader PKI/Pari seperti Ce Mamat, Aliarcham, Tubagus Hilman, dan Haji Joes dan Jawa-jawara terkemuka diantaranya Soleiman Gunungsari, dan Jaro Kamid. Dewan membentuk polisi dan lasykar yang terdiri dari petani dan jawara. Dewan itu memerintah dari Oktober 1945 sampai Januari 1946.

Kemunduran Dewan Rakyat disebabkan oleh berdirinya TKR yang dipimpin Kyai Sya'mun bupati baru di Serang, juga karena pertentangan Dewan dengan kaum ulama. Akibatnya banyak kaum ulama memihak TKR. Perpecahan antara Dewan dan ulama ini terjadi dalam bulan Desember 1945. Di dalam dewan juga terjadi perpecahan antara kaum moderat dan revolusioner. Dewan Rakyat hancur setelah bertempur dengan TKR.

Di daerah Pangerang juga terjadi revolusi sosial yang hebat, Kyai Akhmad merebut kekuasaan pemerintahan. Kyai Akhmad kemudian membujuk pemerintahan rakyat dan segera memecat pamong praja serta polisi yang lama. Pejabat-pejabat baru yang dipilih adalah pemuka-pemuka kaum jawara. Mereka bertindak untuk menghapuskan segala bentuk feodal dan kolonial yang masih ada, termasuk milik dari tuan-tuan tanah Cina.¹⁰ TRI membasmi Kyai Akhmad beserta Lasykar Hitamnya pada akhir tahun 1945.

¹⁰William H. Frederick & Soeri Soeroto, op. cit., h. 323.

Di Karawang, setelah datasemen-datasemen kepolisian bubar, pemimpin kaum jawara Pak Bubar dan kawan-kawannya mengoper kekuasaan negara dan melaksanakan keperintahan. Di sini terjadi juga pendaulatan dan ancaman kepada pamong praja dan polisi. Gerakan Pak Bubar ini akhirnya juga berhasil ditumpas oleh TKR.

Di daerah-daerah lain juga terjadi pengambilalihan oleh para jawara misalnya di Cikampek oleh Pak Belah; di Sukamandi oleh Pak Bontan; di Rengasdengklok oleh gerombolan Ama Gelung; dan di Cabarusa oleh Pak Macan, Camat Nata dan Manaf Roni.¹¹

B. Jawa Barat Setelah Sekutu Datang

Kapitulasi Jepang kepada Sekutu ditandatangani di atas kapal Missouri pada tanggal 2 September 1945, sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara dilakukan di Singapura pada 12 September 1945.¹² Indonesia secara resmi di bawah pengawasan tentara Sekutu Komando Asia Tenggara (SEAC = South East Asia Command) pimpinan Laksamana Moun**tbatten** dari Inggris dan Jendral Blamey dari Australia. Tentara Inggris yang mewakili tentara Sekutu di Indonesia sebagai bekas daerah pendudukan Jepang mempunyai tugas:

¹¹Ibid., h. 326-327.

¹²Kodam VI Siliwangi, Siliwangi dari Masa ke Masa (Jakarta : Fakta Mahjuma, 1968), h. 43.

(1) Melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan perang dan orang-orang interniran yang diselenggarakan oleh suatu badan yang bernama Rehabilitation Allied Prisoners of War and Interness (RAPWI), bertugas di Indonesia antara tahun 1945 hingga tahun 1946 dengan bantuan pemerintah Indonesia, (2) melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya, (3) memelihara ketertiban dan keamanan umum agar supaya yang termaksud di atas dapat dilaksanakan.¹³

Sementara itu pada tanggal 24 Agustus 1945 di London, Belanda dan Inggris membuat suatu perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Civil Affairs Agreement. Dalam persetujuan ini diputuskan bahwa hanya tentara Inggris yang diperbolehkan mendarat di Indonesia, tetapi pada tentara Inggris akan diperbantukan pegawai sipil Belanda sebagai pegawai NICA, kemudian pada waktu yang sesingkatnya kekuasaan penuh akan diserahkan kembali kepada Belanda untuk menguasai Indonesia.

Pada bulan September 1945 pasukan Sekutu memasuki wilayah Indonesia untuk memulai tugasnya. Sumatra dan Jawa diduduki tentara Inggris yang terdiri dari 3 divisi.¹⁴ Sedangkan untuk Kalimantan dan kepulauan Indonesia

¹³Ibid., h. 46, Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (Bandung : Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, 1981), h. 143.

¹⁴Ketiga divisi tersebut adalah:

1. Divisi India ke-23 di bawah komando Mayor Jendral D.C. Hawthorn yang bertugas di Jawa Barat berpusat di Jakarta.
2. Divisi India ke-5 di bawah komando Mayor Jendral E.C. Mansergh yang bertugas di Jawa bagian Timur, berpusat di Surabaya.
3. Divisi India ke-26 di bawah komando Mayor Jendral H.M. Chambers bertugas di Sumatra, di Medan. Lihat G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20, 1 (Yogyakarta : Kanisius, 1988), h. 98.

sebelah timur diduduki tentara Australia. Tentara Inggris dari Divisi India ke-23 mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 berjumlah 2.400 prajurit. Divisi ini terdiri dari kesatuan-kesatuan Seaforth Highlanders, Regiment Punjab, dan Gurkha Rifles. Pendaratan tentara Inggris ini diboncengi oleh NICA dan KNIL.

Mengingat tugas-tugas yang dibebankan kepada pasukan Sekutu, maka pemerintah RI menerima kedatangannya dengan baik. Hal itu nampak dalam pernyataan Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri sebagai berikut:

..... tentara Sekutu yang akan menduduki Negara Indonesia bersifat kepolisian, yakni menjaga keamanan dan ketentraman, selanjutnya untuk menyelesaikan beberapa soal yang berhubungan dengan peperangan.... maka rakyat Indonesia harus bersifat netral kepadanya, berdisiplin pada peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah sendiri dan pemerintah bala-tentara Sekutu.....¹⁵

Pada saat Jepang menyerah kepada Sekutu, orang Jepang yang ada di Jawa berjumlah 70.000 orang yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan sipil.¹⁶ Sementara itu Sekutu memerintahkan kepada pasukan Jepang yang ada di Indonesia untuk menjaga keamanan sebelum Sekutu datang. Di lain pihak pemuda-pemuda berusaha melucuti senjata dan merebut kantor-kantor Jepang. Di Bandung pemuda berhasil merebut kantor-kantor dan tempat-tempat penting seperti PTT, Jawatan Kereta Api, Kantor

¹⁵Kodam VI Siliwangi, op. cit., h. 49-50.

¹⁶David Wehl, The Birth of Indonesia (London : George Allen and Unwin Ltd., 1948), h. 3.

Pertambangan, Karesidenan, pabrik senjata dan lain-lain.

Pada tanggal 12 Oktober 1945 Bridge MacDonald dari Divisi India ke-23 memasuki kota Bandung. Pasukan Sekutu ini mendapat perlawanan dari rakyat yang tergabung dalam berbagai kelaskaran dan TRI. Untuk mengatasi pertempuran maka pada tanggal 15 Oktober 1945 dibentuk Badan Penghubung antara pihak RI dan Sekutu. Pihak Republik diwakili oleh Syamsurizal dan Male Wiranatakusumah sedangkan pihak Sekutu diwakili oleh Kapten Gray dan Clark.¹⁷

Bentrokan antara tentara Belanda dan Sekutu melawan rakyat Bandung terus berlangsung, sehingga pada tanggal 27 Nopember 1945 Gubernur Jawa Barat Sutarjo Kartohadikusuma dipaksa Sekutu menerima pembagian Bandung menjadi dua bagian, yaitu Bandung Utara di bawah kekuasaan Sekutu dan Bandung Selatan di bawah kekuasaan Republik, dan sebagai pembatas adalah jalan kereta api.

Meskipun Bandung sudah dibagi dua tetapi masih juga terjadi insiden di sepanjang rel kereta api, sehingga pihak Sekutu menuntut pengunduran unsur-unsur bersenjata Republik dari kota Bandung. Mayor Jendral Hawthorn selaku pimpinan tentara Sekutu di Bandung mengeluarkan ultimatum untuk memaksa semua pasukan bersenjata agar keluar dari kota Bandung bagian selatan dengan jarak radius 11 kilometer, dengan batas akhir tanggal 24

¹⁷John R.W. Smail, Bandung in The Early Revolution 1945-1949 (New York : Cornell U.P., 1964), h. 67.



Maret 1946 pukul 24.00. Pemerintah Republik menyetujui tuntutan. Komandan Divisi III TRI. A.H. Nasution pada tanggal 24 Maret mengeluarkan perintah sebagai berikut:

(a) Semua pegawai dan rakyat harus ke luar dari kota Bandung sebelum jam 24.00; (b) semua kekuatan bersenjata melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada; (c) sesudah matahari terbenam kedudukan musuh di sebelah utara rel kereta api supaya diserang oleh para pejuang yang ada di daerah utara sambil sedapat mungkin melakukan bumi hangus, begitu pula dari selatan harus melakukan penyusutan ke utara sebagai serangan perpisahan; (d) pos komando dipisahkan ke Kukalot.¹⁸

Pada malam hari tanggal 24 Maret 1946 terjadi peristiwa besar yaitu Bandung Lautan Api. Kekuatan Republik baik sipil maupun militer dapat dikatakan tidak ada karena semua mengungsi ke luar kota Bandung. Dengan demikian kota Bandung sepenuhnya dikuasai tentara Sekutu dan Belanda.

Pada tanggal 22 Oktober 1945 tentara Inggris memasuki Bogor, mereka kemudian membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang.¹⁹ Pada bulan Desember mereka berhasil menduduki Istana Bogor. Pos-pos yang dikuasai Inggris kemudian diserahkan kepada Belanda pada tanggal 24 Oktober 1946. Tentara Sekutu (Inggris) kemudian diganti oleh tentara Belanda dari Brigade Groep yang terdiri dari Batalyon Prinses Irene, Batalyon Regiments Grenadiers, dan Batalyon Jagers di bawah pimpinan

¹⁸Djajusman, Bandung Lautan Api (Bandung : Angkasa, 1986), h. 84-85.

¹⁹Edi S. Ekadjati, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat (Bandung : Depdikbud, 1979), h. 126.

Kolonel Thomson.²⁰ Tentara Belanda kemudian berusaha menghapus kekuasaan Republik di Bogor dengan menangkap residen dan staff karesidenan.

Di Jakarta pada bulan Desember 1945 terjadi pembubaran polisi RI oleh Sekutu. Karena suasana tidak aman, maka pada tanggal 4 Januari 1946 presiden dan wakil presiden pindah ke Yogyakarta. Pemindahan pusat pemerintahan ini karena keadaan di Jakarta tidak aman lagi dan unsur menyempurnakan organisasi dalam negeri.²¹

Dengan dikuasainya jalur Jakarta-Bogor-Bandung dan menyingkirnya kekuatan-kekuatan Republik ke luar kota, maka Jawa Barat berada dalam cengkeraman Sekutu dan Belanda. Kekuatan militer Belanda semakin ditambah untuk mengganti kekuatan Sekutu, sehingga Belanda menguasai tempat-tempat penting di Jawa Barat.²² Setelah Agresi Militer I, Belanda baru berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat.

C. Perundingan Antara Indonesia dengan Belanda

Pada saat Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Belanda di Den

²⁰Gelora Rakjat, 9 Nopember 1946.

²¹Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta : Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953), h. 129-130.

²²Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), h. 126.

Haag maupun pemerintah Hindia Belanda di Brisbane pimpinan Letnan Gubernur Jendral Dr. H.J. van Mook, masih memimpikan pemulihan pemerintahan kolonial di Indonesia. Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menuduhnya bahwa Republik adalah ciptaan Jepang maka Belanda tidak akan mengadakan perundingan dengan Republik.²³

Tetapi apa yang terjadi di Jakarta di luar dugaan Belanda. Ternyata proklamasi begitu kokoh karena mendapat dukungan dari rakyat. Keadaan ini memaksa Christison, panglima tertinggi pasukan Inggris di Jawa dan Sumatra, mengakui secara de facto atas Republik. Karena Inggris tidak mau terlibat dalam konflik politik yang berlarut-larut antara Belanda dan Republik, maka Mountbatten mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin nasionalis di Indonesia. Sementara itu van Mook tidak mendapat instruksi terperinci dari pemerintahnya. Sedangkan yang ia ketahui mengenai persoalan masa depan politis Indonesia ialah akan diadakannya suatu Konferensi Kerajaan (Rijksconferentie) antara wakil-wakil pemerintah Belanda dan pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia sesuai pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942.²⁴ Namun setelah sadar bahwa Republik

²³K.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggajati (Jakarta : Gunung Agung, 1986), h. 26.

²⁴Ide Anak Agung Gde Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (Yogyakarta : Gadjah Mada U.P., 1985), h. 6.

mendapat dukungan dari rakyat dan bukan boneka Jepang, van Mook bertemu dengan pemimpin-pemimpin pemerintah Republik. Pertemuan mendapat kecaman keras dari pemerintah Belanda. Sementara itu di dalam tubuh pemerintah Republik terjadi pergeseran dimana Syahrir, tokoh nasionalis yang anti Jepang, diangkat menjadi perdana menteri. Pergeseran ini membuka peluang bagi Republik untuk berunding dengan Belanda.

Guna perundingan lebih lanjut pemerintah Inggris mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai penengah. Pemerintah Belanda mengeluarkan suatu keputusan tanggal 10 Februari 1946 yang selanjutnya menjadi dasar perundingan dengan Republik. Isi pokoknya adalah :

- (1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda;
- (2) masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda;
- (3) sebelum dibentuknya persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun;
- (4) Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.²⁵

Berdasar usul-usul di atas perundingan antara van Mook dan Syahrir dimulai. Syahrir menolak usul-usul tersebut. Masalah yang paling sulit adalah soal pengakuan kedaulatan Republik di seluruh wilayah Indonesia yang dituntut Syahrir.

Untuk mengatasi kemacetan perundingan van Mook memajukan usul-usul baru. Usul ini dipengaruhi oleh dasar perjanjian Vietnam-Perancis tentang pemacetan masa-

²⁵Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, op. cit., h. 124.

lah Indo Cina. Isi pokoknya adalah:

(1) Republik yang meliputi daerah Jawa, menjadi peserta di dalam sebuah negara federal Indonesia yang merdeka; (2) Republik akan menyetujui penempatan pasukan-pasukan tempur Belanda di daerahnya guna melaksanakan tugas-tugas Sekutu; (3) Republik akan menyetujui penghentian permusuhan; (4) Republik akan mengambil bagian bersama para wakil semua bagian lain Hindia Belanda di dalam suatu musyawarah umum tentang sebuah negara Indonesia dan hubungan-hubungannya dengan Kerajaan Belanda.²⁶

Pada tanggal 27 Maret 1946 Syahrir mengajukan usul balasan kepada van Mook, usul tersebut adalah:

(1) Supaya pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa dan Sumatra; (2) Supaya RI dan Belanda membentuk RIS; (3) RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.²⁷

Dari kedua usul tersebut ternyata pendapat-pendapat kedua belah pihak sudah berdekatan. Republik mengesampingkan tuntutan kedaulatannya atas seluruh Indonesia dan pihak Belanda mengakui kekuasaan de facto atas Jawa dan Sumatra. Guna menyelesaikan persoalan ini dengan segera diputuskan supaya van Mook bersama suatu delegasi Republik berangkat ke Negeri Belanda untuk berunding dengan menteri-menteri yang berwenang dan bertanggungjawab di sana.

Perundingan selanjutnya dilangsungkan di Hoge Veluwe. Namun perundingan itu gagal mengeluarkan suatu persetujuan. Sebab kegagalan ini terletak di bidang po-

²⁶Ide Anak Agung Gde Agung, Renville (Jakarta : Sinar Harapan, 1983), h. 26-27.

²⁷Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, op. cit., h. 126.

litik dan teknis. Kabinet Schermerhorn, sebagai pemerintah peralihan merasa tidak berwenang untuk mengambil keputusan sejauh itu. Kabinet menilai bahwa ~~bidang ini~~ termasuk wewenang pemerintah baru yang akan dibentuk setelah pemilihan umum 17 Mei 1946. Kabinet juga yakin bahwa suatu persetujuan dengan Republik atas dasar kata sepakat antara Syahrir dan van Mook tidak akan diterima parlemen, karena Partai Rakyat Katolik (KVP) dan partai keagamaan lain dengan sengit menentang persetujuan itu. Kabinet juga beranggapan bahwa bila tercapai persetujuan dengan delegasi Indonesia tidak dapat dirumuskan dalam suatu perjanjian, melainkan hanya dalam suatu protokol, mengingat Republik tidak dianggap sebagai sebuah negeri yang merdeka.²⁸

Sementara hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Belanda terhenti menyusul gagalnya perundingan Hoge Veluwe, van Mook mengalihkan perhatiannya ke luar Jawa dan Sumatra untuk mewujudkan politiknya. Usaha van Mook dipermudah oleh tentara pendudukan Australia yang mengkonsolidasi NICA dan KNIL dalam tugasnya. Setelah daerah-daerah luar Jawa diserahkan kepada Belanda pada 1 Juli 1946, van Mook memanggil wakil-wakil daerah tersebut dalam konferensi di Malino. Dalam konferensi disetujui mengenai federasi Indonesia dan menyokong pembentukan dua negara yaitu Kalimantan dan Ti-

²⁸Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, h. 28-29.

mur besar.²⁹ Hasil Konferensi Malino kemudian menjadi dasar Konferensi Denpasar yang pada akhirnya membentuk Negara Indonesia Timur. Pembentukan negara diikuti oleh daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa dan Sumatra, bahkan di Jawa dan Sumatra juga muncul negara-negara baru.

Pada bulan Juli 1946 kabinet Belanda tersusun sebagai hasil pemilu, Dr. L.J.M. Beel sebagai Perdana Menteri dan J.A. Jonkman sebagai menteri Seberang Lautan. Untuk berunding dengan Republik Indonesia, Beel membentuk Komisi Jendral yang diketahui Profesor Schermerhorn. Sebagai penengah Inggris mengirinkan Lord Killearn. Perundingan antara Komisi Jendral dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Syahrir setelah ia berhasil menyusun kabinet untuk ketiga kalinya, pada bulan Oktober. Perundingan kemudian diteruskan di Linggajati. Hasil persetujuan Linggajati ditandatangani dan diumumkan di rumah kediaman Syahrir. Asas-asas pokok Persetujuan Linggajati adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai de facto menjalankan kekuasaan atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
2. Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama supaya terbentuk Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan merdeka atas dasar demokratis dan federal.
3. Wilayah Negara Indonesia Serikat meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda, dengan pengertian bahwa bila rakyat sebuah daerah juga setelah berunding dengan daerah-daerah lainnya melalui jalan demokratis, menyatakan tidak atau belum mau masuk ke dalam Negara Indonesia Serikat, maka bagi daerah

²⁹C. Smit, Dekolonisasi Indonesia (Jakarta : Pustaka Azet, 1986), h. 16.

itu dapat diadakan hubungan khusus dengan Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.

4. Bagian-bagian Negara Indonesia Serikat adalah: daerah Republik, Kalimantan dan Indonesia Timur tanpa mengurangi hak rakyat suatu daerah, bahwa mereka menghendaki kedudukan yang lain dalam Negara Indonesia Serikat.³⁰ ... dan seterusnya.

Perjanjian Linggajati harus diratifikasi oleh parlemen kedua belah pihak sebelum dilaksanakan. Proses ratifikasi perjanjian Linggajati tidak gampang karena kedua parlemen pada awalnya menolak isi perjanjian itu. Parlemen Belanda menganggap Pemerintah Belanda terlalu jauh membuat konsensi terhadap Republik. Keberatan utama adalah terhadap pasal 1 yang mengakui kekuasaan de facto Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatra.³¹ Namun akhirnya Parlemen Belanda meratifikasi setelah berhasil diyakinkan bahwa persetujuan itu bersifat sementara, jadi masih akan diadakan pengaturan lebih lanjut yang menyangkut hubungan Belanda dan Indonesia, tetapi juga merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai pada waktu itu.³²

KNIP juga tidak segera memberikan pengesahan karena menganggap persetujuan Linggajati terlalu mengun-

³⁰ Ringkasan ini diambil dari Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, h. 37-38, isi perjanjian selengkapnya lihat lampiran.

³¹ George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca and London : Cornell University Press, 1970), h. 198.

³² G. Moedjanto, op. cit., h. 182.

tungkan Belanda dan tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan yang menghendaki kemerdekaan Indonesia seratus persen. Partai yang begitu keras menentang perjanjian ini adalah Masyumi, PNI, dan pengikut Tan Malaka (Persatuan Perjuangan).³³ Pasal yang memberatkan bagi kelompok ini adalah pasal 6, 7, 8, dan 14.³⁴

Agar Perjanjian Linggajati dapat diterima KNIP maka Sukarno menambah jumlah anggota KNIP. Untuk itu presiden lalu mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tertanggal 29 Desember 1946. Peraturan Presiden ini mengubah jumlah anggota KNIP 200 menjadi 514.³⁵ Ketika partai penentang Perjanjian Linggajati menolak penambahan jumlah anggota KNIP, maka presiden dan wakil presiden meminta KNIP memilih presiden dan wakil presiden baru. Karena tidak dapat menemukan pemimpin lain maka partai-partai penentang Linggajati terpaksa menerima persetujuan itu.

Demikian latar belakang munculnya Negara Pasundan 1947, dalam bab berikut akan diuraikan mengenai keberadaan negara itu.

³³Ibid., h. 183.

³⁴George McTurnan Kahin, op. cit., h. 199.

³⁵G. Moedjanto, loc. cit., untuk lebih jelasnya lihat juga George McTurnan Kahin, op. cit., h. 199-201.

BAB III

NEGARA PASUNDAN 1947

A. Partai Rakyat Pasundan

Bila kita berbicara tentang Partai Rakyat Pasundan kita tak bisa lepas dari Kartalegawa. Siapakah Kartalegawa itu? Ia mempunyai nama lengkap Raden Adipati Mohammad Moesa Soeria Kartalegawa, nama kecilnya Aom Oetja. Ayahnya bernama Haji Moesa berasal dari Sumedang, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Tedjamirah. Haji Moesa adalah seorang penghulu di Kabupaten Garut yang diberi pangkat bupati hingga tujuh turunan karena jasanya terhadap Belanda.¹ Suria Kartalegawa diangkat menjadi Bupati Garut mulai tahun 1929 sampai tahun 1944.² Pada waktu dilantik menjadi bupati, ia mengucapkan sumpah tujuh turunan akan mengabdikan dirinya untuk Belanda, tetapi menjelang keruntuhan Hindia Belanda ia sering berselisih paham dengan asisten residen Garut.³

Pada masa pendudukan Jepang Kartalegawa merasa tidak puas karena jabatannya bukan lagi sebagai Bupati dan pemimpin agama, tetapi sebagai pembantu Jepang yang bertugas menyediakan beras untuk Jepang di daerah Garut.

¹Masjarakat, no. 20, 18 Mei 1947, h. 11.

²A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 4 (Bandung : Angkasa, 1975), h. 276.

³Berita Indonesia, 5 Mei 1947.

Selain itu ia sering juga diminta Jepang menyediakan wanita-wanita untuk serdadu Jepang.⁴ Setelah Republik Indonesia berdiri ia kecewa karena tidak mendapat kedudukan. Kekecewaan Kartalegawa bertambah karena di Jawa Barat banyak diangkat pejabat bukan orang Sunda, salah satu contohnya adalah gubernur.⁵ Kartalegawa merasa bahwa orang Sunda sekarang tidak lagi mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi dikuasai oleh suku Jawa dalam pemerintahan Republik Indonesia.⁶

Karena berbagai kekecewaan dan didukung dengan ambisinya, Kartalegawa berusaha membentuk organisasi untuk melindungi rakyat Sunda agar rakyat Sunda dapat bebas menyatakan kehendaknya dan mempunyai pemerintahan sendiri. Sebagai bekas Bupati Kartalegawa mempunyai banyak pengikut dan masih punya pengaruh dalam masyarakat untuk mendukung cita-citanya. Organisasi yang dikehendaki Kartalegawa adalah Partai Rakyat Pasundan dan berusaha mendirikan Negara Pasundan. Pendukung Suria Kartalegawa kebanyakan terdiri dari golongan bangsawan terpelajar yang tidak mendapat kedudukan dalam pemerintahan Republik, pejabat pemerintah di daerah kekuasaan Belanda

⁴Rekaman wawancara antara Machfudi Mangkudilaga dengan Suria Kartalegawa, 4 Desember 1974 di Bandung (Koleksi Arsip Nasional Jakarta), pita I, side A.

⁵Gubernur Jawa Barat yang pertama adalah Sutardjo orang Jawa, kemudian berturut-turut Datuk Djamin orang Minangkabau, dr. Murjani dari Jawa, baru setelah timbul Partai Rakyat Pasundan dipegang orang Sunda yaitu Sewaka sejak April 1947.

⁶Rekaman wawancara antara Machfudi Mangkudilaga dengan Suria Kartalegawa, 4 Desember 1974 di Bandung, pita I, side B.

da, kaum agamawan yang tidak menyukai pemerintahan Republik, dan rakyat Sunda di daerah kekuasaan Belanda. Belanda membantu mewujudkan ide Kartalegawa ini karena sesuai dengan ide politik federal van Mook untuk mendirikan negara-negara bagian di luar Republik. Oleh karena itu Kartalegawa mendapat dukungan dari Pemerintah Sipil Pendudukan (Hoofd Tijdelijk Bestuur, HTB) di bawah Residen Klaassen.

Sejak awal April 1946 Kartalegawa sudah mulai mengumpulkan pengikut untuk mendirikan Partai Rakyat Pasundan. Kegiatannya diawali dengan mengadakan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat di Bandung yang tidak menyukai Republik. Pengumpulan massa didapat dengan jalan mendekati kepala daerah, kemudian kepala-kepala daerah memerintahkan rakyatnya untuk mengikuti jejaknya. Kegiatan mereka masih sembunyi-sembunyi, karena kekuatan Republik masih ada. Setelah Bandung diserahkan oleh Inggris kepada Belanda, maka kekuasaan di Bandung dipegang militer Belanda. Keadaan ini sangat memudahkan Kartalegawa untuk mewujudkan cita-citanya.⁷

Pada tanggal 20 Nopember 1946 Partai Rakyat Pasundan berdiri di Bandung, kemudian mendapat persetujuan

⁷Berita Indonesia, 24 Desember 1946.

dari Belanda tanggal 7 Desember 1946. Dasar dan tujuan Partai Rakyat Pasundan ini tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, yang menyebutkan bahwa:

Untuk mempersatukan rakyat Pasundan, maka pada tanggal 20 Nopember 1946, berdirilah Partai Rakyat Pasundan, yang berdirinya berdasarkan:

1. Hasilnya conferentie Malino dan lanjutannya, dimana diletakkan dasar-dasar Negara Indonesia Serikat yang terdiri dari gabungan negara-negara bagian di kepulauan Indonesia.
2. Sesuai dengan jalannya dan hasilnya perundingan-perundingan politik antara Belanda dan Republik Indonesia.
3. Sesuai dengan pernyataan rakyat Pasundan, bahwa rakyat Pasundan bukan rakyat yang ikut-ikutan saja kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari Ir. Sukarno - Drs. Hatta tetapi bahwa berkemauan bernegara merdeka, berdaulat dan demokratis, adalah kemauan rakyat Pasundan sendiri dalam gabungan Negara Serikat Indonesia, yang merdeka, berdaulat dan demokratis, bekerja bersama-sama Belanda atas dasar penghargaan yang sama derajatnya sehingga tiba waktunya bangsa Indonesia menentukan politiknya sendiri dalam gelanggang internasional.

Oleh karena itu Partai Rakyat Pasundan bertujuan: Menuntut supaya daerah Pasundan menjadi Negara Pasundan dan yang merdeka, berdaulat dan demokratis, sebagai anggota Negara Serikat Indonesia, yang merdeka, berdaulat dan demokratis, bekerja bersama-sama Belanda atas dasar penghargaan yang sama derajatnya, sementara tiba waktunya, bahwa bangsa Indonesia menentukan politiknya sendiri dalam gelanggang Internasional.⁸

Selanjutnya di dalam Anggaran Dasar Partai Rakyat Pasundan dicantumkan maksud dan tujuan partai ini yang berbunyi sebagai berikut:

Tujuan partai ialah mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka dan berdaulat

⁸ Pengurus Besar Partai Rakjat Pasundan, Tujuan Partai Rakjat Pasundan (Bandung : Visser, 1948), h. 2, ejaan disesuaikan menurut EYD oleh penulis.

dan berdasarkan democratie (kerakyatan) dalam ikatan secara federatie dan termasuknya Negara Pasundan sebagai Negara (tidak sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatera) dari Negara Indonesia Serikat sementara waktu dalam lingkungan Kerajaan Belanda.⁹

Dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Pasundan yang disahkan 20 Nop 1946 nampak adanya hubungan dengan pasal 3 dan 4 Perjanjian Linggajati. Pasal itu ditafsirkan oleh Partai Rakyat Pasundan sebagai kebebasan untuk menentukan status daerahnya terhadap Negara Republik Indonesia Serikat, apakah mau berdiri sendiri atau merupakan wilayah dari Republik Indonesia.

Susunan Pengurus Partai Rakyat Pasundan waktu pertama kali terbentuk adalah sebagai berikut:

Ketua Pengurus Besar Partai	: Suria Kartalegawa
Ketua Partai Cabang Bandung	: Mas Supenah
Sekretaris	: Mas Machmoed
Bendahara	: Raden Wiradimadja
Anggota	: M. Soemeng Karmidjaja
	Mas Andamihardja
	Joesof
	Djajadisastra
	Sukarsa.

Tokoh-tokoh pendukung Partai Rakyat Pasundan cukup banyak tetapi terbatas di daerah Bandung, Cianjur, Bogor, dan sekitarnya.

⁹Ibid., h. 5.

Pendukung Suria Kartalegawa dari kalangan pemerintah antara lain:

Marta Wisastra : Wedana Bandung
Saleh Goerandi : Asisten Wedana Bandung
M. Soemeng Karmidjaja: Kepala Daerah Cipaganti
Bandung
Jusuf : Instruktur Militer Bogor
Mas Soepenah : Jawatan Penerangan

Pendukung Kartalegawa dari kalangan intelektual dan kelas menengah antara lain R. Hidajat Adiwidjaja (Bandung), Hamzah Soekaemi (Bekasi), M. Adjenaar Djajapawira (Bandung), Machmoed (Cianjur), R. Sadikin (Bandung), R. Mh. Moecusin (Jakarta), Mas Agus Kusuma Dinata (Bogor), Abas Suradiradja (Jakarta). Pendukung dari kalangan agama antara lain H. Djoenaedi (Tangerang), H. Dachlan (Pasar Rebo), H. Dachlan (Citeureup), R.H. Wiradimadja (Bandung), Kiai Agus Abdulroni (Cibabat), R.H. Mohammad Afandi (Kepala Penghulu Bandung), dan Kiai Haji Mochtar (Jatinegara).

Usaha Partai Rakyat Pasundan yang pertama ialah mengirim telegram kepada Ratu Belanda pada tanggal 6 Desember 1946. Telegram tersebut meminta kepada Ratu untuk memperhatikan daerah Sunda. Dengan jalan demokrasi dibentuk suatu negara yang tidak termasuk bagian Republik Indonesia dan negara ini dimasukkan dalam Federasi Negara Indonesia Serikat.

Pada tanggal 12 Desember 1946 Partai Rakyat Pa-

Pasundan mengirimkan surat kepada van Mook yang berisi pemberitahuan bahwa Partai Rakyat Pasundan menjadi satu-satunya partai untuk rakyat Sunda yang dapat mengutarakan suaranya atas nama berjuta-juta rakyat Sunda serta menuntut kemerdekaan bagi tanah Sunda.

Berkenaan dengan surat dari Partai Rakyat Pasundan kepada Ratu, Menteri Jonkman atas nama Ratu Belanda pada tanggal 14 Desember 1946 memberi kuasa kepada van Mook untuk membalasnya. Dalam telegram balasannya kepada Partai Rakyat Pasundan van Mook menyatakan bahwa akan memperhatikan penduduk Pasundan seperti penduduk Indonesia lainnya. Kehendak dan keinginan yang diberitahukan kepada Belanda secara demokratis akan diperhatikan. Berhubungan dengan pasal 3 dan 4 Linggajati, maka akan diadakan pemungutan suara di daerah Jawa Barat.¹⁰

Pada tanggal 17 Desember 1946 di Bogor terjadi aksi propaganda Partai Rakyat Pasundan, dan pada waktu yang bersamaan terjadi juga aksi tentara Belanda menduduki kantor Jawatan Angkutan dan menculik beberapa pejabat Republik. Pemerintah Republik kemudian memindahkan pusat pemerintahan Karesidenan Bogor ke Sukabumi, sebagai pimpinan sementara ditunjuk Hilman Djajadiningrat sebagai residen, Koesoema Soembodo orang Jawa sebagai polisi karesidenan, dan Abdur Rahman pada bagian penerangan.¹¹ Setelah berhasil menduduki dan menguasai Bogor Be-

¹⁰Suluh Rakjat, 20 Mei 1947.

¹¹Berita Indonesia, 24 Desember 1946.

landa mengangkat Statius Muller sebagai waki kota, sedangkan yang menjaga keamanan kota tentara Belanda.¹² Aksi propaganda Partai Rakyat Pasundan ini mempertemukan Kartalegawa dengan Mr. Kustomo orang Jawa yang kemudian menjadi sekretaris partai. Setelah daerah Bogor dan Bandung dikuasai Belanda maka hubungan daerah tersebut dengan Republik hampir terputus.

Dalam usaha menarik massa, Partai Rakyat Pasundan memberi tanda anggota berupa cap ayam jago. Dengan kartu ini anggota dijanjikan mendapat pembagian makanan, pakaian, dan pekerjaan. Kekurangan bahan makanan dan seringnya terjadi bentrokan antara Belanda dan Republik menyebabkan sebagian besar penduduk memilih untuk bergabung dengan Partai Rakyat Pasundan. Penyebaran pengaruh Partai Rakyat Pasundan dilakukan juga melalui kepala daerah seperti wedana dan asisten wedana seperti yang terjadi di Cianjur dan Cimahi. Penyebaran ke arah timur hanya sampai Ujungberung karena di luar daerah itu merupakan wilayah kekuasaan Republik. Penyebaran ke arah barat antara lain ke Cimahi, Cianjur, Bogor, sampai ke daerah pinggiran Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi.

Dalam usaha menarik massa di sekitar Jakarta didirikanlah Badan Penolong Keselamatan Umum oleh R.

¹²Sejarah Kabupaten Bandung (Bandung : Pemerintah Daerah Jawa Barat Kabupaten Bandung, 1974), h. 325. Lihat juga Rakjat, 29 April 1946.

Moechsin.¹³ Organisasi bertujuan melindungi rakyat dari teror tentara Republik yang bentrok dengan tentara Belanda serta memberi jaminan makanan untuk menolong rakyat yang kekurangan. Anggota badan ini kemudian digabungkan dengan anggota yang ada di Bandung. Setelah penggabungan itu anggota Partai Rakyat Pasundan tercatat 100.000 orang. Jumlah anggota partai itu terus bertambah hingga tercapai 250.000 orang pada bulan April 1947. Setelah dirasa mendapat pendukung yang cukup maka persiapan-persiapan mendirikan Negara Pasundan dimulai.¹⁴

B. Proklamasi Negara Pasundan 1947

Persiapan-persiapan untuk mendirikan Negara Pasundan dimulai bulan April sampai awal Mei 1947. Pada tanggal 29 April Mr. Kustomo mengadakan wawancara dengan koresponden Reuter dan United Press untuk memberi penjelasan dan menyebarkan berita mengenai akan diproklamasikannya Negara Pasundan. Hasil wawancara dengan Reuter memberi gambaran bahwa tanggal 4 Mei 1947 akan diproklamasikan Negara Pasundan di Bandung. Suria Kartalegawa yang akan menjadi proklamator sekaligus menjadi presiden sedangkan Mr. Kustomo akan menjadi Perdana Menteri. Ne-

¹³Lindayanti, Jawa Barat Setelah Perjanjian Linggajati (Skripsi Fak. Sastra UGM, 1984), h. 52 yang dikutip dari S.L. van der Wal, Officiele Bescheiden Betreffende de Nederland-Indonesische Betrekkingen 1945-1950 No. 5 s¹ - Gravenhage: martinus Nijhoff, 1976), h. 513.

¹⁴A.H. Nasution, Op.Cit., h. 280.

gara Pasundan akan berfederasi dalam Negara Insonesia Serikat. Negara Pasundan akan meliputi karesidenan Banten, Bogor, Priangan, Cirebon, dan Jakarta. Partai Rakyat Pasundan atas nama rakyat Sunda meminta pengertian dan kebijaksanaan Republik, sehingga rakyat Sunda dapat mendirikan Negara Pasundan.

Hasil wawancara dengan United Press menyebutkan proklamasi Negara Pasundan yang akan dilakukan pada 4 Mei 1947, karena dikuatirkan Republik mempunyai hubungan dengan Rusia dan gerakan komunis. Pada bulan April 1947 terjadi bentrokan antara dua divisi tentara Sunda yang berjumlah 12 ribu orang melawan tentara Republik di dekat Cilacap. Dalam pertempuran ini dua divisi tentara Sunda telah dihancurkan oleh TRI.¹⁵ Namun kedua hal itu dibantah oleh Republik dan dianggap hanya sebagai dalih.

Sementara itu kantor berita Aneta mengadakan wawancara dengan direktur kabinet P.J. Koets meminta pendapatnya mengenai Negara Pasundan yang akan diproklamasikan. Menurut Koets, berdasarkan Perjanjian Linggajati pasal 3 dan 4 terbuka kesempatan bagi tiap daerah untuk menyatakan kebebasannya lepas dari Republik.¹⁶ Dengan demikian Koets tidak memustahilkan berdirinya Negara Pasundan.

¹⁵ Rakjat, 2 Mei 1947, Masjarakat no. 19, 11 Mei 1947, lihat juga A.H. Nasution, op. cit., h. 463.

¹⁶ Rakjat, 2 Mei 1947, A.H. Nasution, loc. cit.

Kantor Penerangan Belanda (RVD = Regerings Voorlichting Diest) mengenai gerakan Partai Rakyat Pasundan berikut: Partai Rakyat Pasundan didukung sifat separatistis yang dapat tumbuh karena struktur masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku. Indonesia lebih tepat jika berbentuk serikat untuk menghindari separatistis. Berdasarkan kebudayaan dan latar belakang politis-historis yang berbeda, boleh dikatakan Partai Rakyat Pasundan dapat menjadi kuat. Tetapi RVD masih meragukan keberhasilan proklamasi Negara Pasundan 1947, karena belum waktunya Partai Rakyat Pasundan mendirikan negara.

Pada tanggal 30 April 1947 Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa tidak pernah akan membiarkan setiap gerakan pemisahan dari Republik. Gerakan separatistis Partai Rakyat Pasundan tidak mungkin bertahan lama melihat hasil kunjungan ke Priangan awal April 1947. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Presiden Sukarno ke Garut, di sana Presiden disambut beribu-ribu rakyat yang menyatakan kesetiaannya untuk tetap bergabung dengan Republik. Roem menambahkan bahwa Partai Rakyat Pasundan hanya didukung oleh sekelompok kecil rakyat Sunda sehingga lemah, apalagi bila dilihat bahwa sekretaria partai yaitu Mr. Kustomo adalah orang Jawa.

Ir. Enokh, salah seorang pemuka Pasundan yang berada di Yogyakarta menentang usaha pendirian Negara Pasundan dengan suatu keterangan pada tanggal 3 Mei 1947 sebagai berikut:

Atas nama Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Republik Indonesia, maka dengan ini dipermaklumkan:

1. Mulai tanggal 3 Mei 1947 menghidupkan lagi Paguyuban Pasundan yang berdiri dan hidup sebagai badan hukum untuk mengakui dan menyokong Negara Republik Indonesia.
2. Memohon dan mewajibkan kepada pemimpin-pemimpin cabang yang ada di Bandung (Cicalengka, Ciparay, Soreang, Cimahi, Cililin, Ujungberung) untuk mengurus harta benda dan utang-piutang Paguyuban Pasundan dengan anggota sebaik-baiknya. Minta perhatian, bahwa Paguyuban Pasundan dari semula dibuka untuk seluruh warga negara bukan untuk orang Sunda asli saja.
3. Mengurus dan membuka lagi semua sekolahnya dengan menyelesaikan leerplannya dengan keadaan Negara Republik Indonesia.
4. Membuka lagi bank-bank Paguyuban Pasundan, badan-badan koperasi, sambil mengurus utang-piutangnya. Juga harus dibuka kembali badan-badan sosial seperti fonds-fonds pensiun, kematian, dan urusan fakir miskin.
5. Membangkitkan semangat, bahwa Tanah Pasundan adalah suatu bagian dalam Negara Republik Indonesia dan menentang sekeras-kerasnya akan dibentuknya negara Pasundan Nica Kartalegawa.¹⁷

Pada hari yang sama melalui Radio Republik Indonesia di Garut, ibu Kartalegawa yang tinggal di Garut menyampaikan ketidaksetujuannya dengan tindakan anaknya tersebut. Ia berpesan sebagai berikut:

Oetja, ibu tidak mengerti kau berbuat yang bukan-bukan, tidak ingatkah kau kepada ibu dan saudara-saudara lainnya hingga kau sekarang memisahkan diri dari keluarga, orang tuamu tidak menyetujui kau masuk Nica itu. Bukan ibu saja yang tidak setuju, tetapi juga saudara-saudaramu dan semua keluargamu. Sedangkan Kang Abas Cianjur yang kini tinggal di Tasik Malaya sudah sengaja menyatakan kepada Soekarno bahwa ia tidak menyetujui perbuatanmu itu, ibu tetap memberi maaf kepadamu, mudah-mudahan kau berbalik pikir sehingga ibu dengan semuanya selamat.¹⁸

¹⁷ Nasution, op. cit., h. 463-464, lihat juga Be-rita Indonesia, 5 Mei 1947 dan Kedaulatan Rakyat, 5 Mei 1947.

¹⁸ Transkrip Pidato ini dimuat dalam Merdeka, 6 Mei 1947; Masyarakat, 11 Mei 1947.

Dalam rapat Partai Rakyat Pasundan tanggal 3 Mei, yang juga dihadiri kolonel Santoso dari pihak Belanda, berhasil disepakati naskah proklamasi Negara Pasundan.¹⁹ Naskah tersebut akan dibaca oleh Kartalegawa dalam bahasa Sunda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Mr. Kustomo.

Proklamasi berdirinya Negara Pasundan dilaksanakan tanggal 4 Mei 1947 pukul 09.00 di alun-alun Bandung. Jalannya proklamasi disiarkan secara langsung oleh Radio Resmi Bandung. Pada waktu itu hadir pula van Mook; wakil-wakil politik Belanda seperti KVP (Katholieke Volks Partij), IEV (Indo Europess Verbond) dan CP (Civiele Politie); wakil partai politik Cina; wakil partai politik Indonesia seperti perkumpulan orang Manado, Timor, Ambon; wartawan dari luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan Perancis.²⁰ Proklamasi dihadiri sekitar 5.000 orang, kebanyakan dari Ujungberung dan Kiara Condong yang diangkut dengan truk-truk militer Belanda.

Sebelum naskah proklamasi dibacakan didahului oleh empat pembicara yang mewakili berbagai daerah di Jawa Barat, yaitu Raden Mochtar, Yusuf, Hamzah, dan Raden Machmoed. Keempatnya berturut-turut adalah wakil dari daerah Jatinegara, Bogor, Bekasi, dan Cianjur. Isi

¹⁹ Ariwiadi, "A Putsch by the Pasundan Peoples Party in Bogor on May 23 1947" dalam International Association of Historians of Asia sixth Congress, Yogyakarta 26 - 30 Agustus 1974, h. 4.

²⁰ Kakjat, 5 Mei 1947.

pidato mereka pada intinya mendukung berdirinya Negara Pasundan.

Setelah pidato-pidato tersebut kemudian Suria Kartalegawa membacakan naskah proklamasi Negara Pasundan dalam bahasa Sunda, diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Mr. Kustomo dan ke dalam bahasa Indonesia oleh Soe-leiman. Ringkasan Proklamasi Negara Pasundan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partai Rakyat Pasundan dengan ini memproklamkan kemerdekaannya Negara Pasundan sesuai dengan kemauan rakyat Sunda, dalam hubungan federatif, karena jalan ini adalah satu-satunya untuk politik negara ini di kemudian hari.
2. Partai Rakyat Pasundan akan menentang usaha-usaha untuk memasukkan daerah-daerah yang telah dimerdekakannya ke dalam Republik.
3. Partai Rakyat Pasundan mendorong supaya di daerah-daerah yang telah dimerdekakan maupun di daerah Republik diadakan pemungutan suara.
4. Partai Rakyat Pasundan menjadikan Bandung sebagai ibu kota negara "Negara Pasundan".
5. Partai Rakyat Pasundan akan mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan onderneming kepunyaan bangsa asing kepada yang punya.
6. Partai Rakyat Pasundan meminta pengakuan pemerintah sementara di daerah-daerah yang dimerdekakannya, jika pemungutan suara berhasil.
7. Partai Rakyat Pasundan minta untuk pemerintahan sementara ini status sama dengan pemerintah Indonesia Timur.
8. Partai Rakyat Pasundan memilih sebagai anggota pemerintahan sementara dari Negara Pasundan R.A. A.M.M. Suria Kartalegawa sebagai presiden dan Mr. Kustomo sebagai pembentuk kabinet, anggota-anggota lainnya dari kabinet tersebut tidak akan diumumkan untuk menjaga keselamatannya masing-masing.

Dengan pemerintah Belanda telah diadakan 5 buah persetujuan, yang antara lain berbunyi: sambil menunggu selesainya peraturan-peraturan baru yang menurut Undang-Undang Dasar, tetap berlaku peraturan konstitusional Kerajaan Belanda, dan dengan itu juga kekuasaan Belanda atas seluruh Hindia Belanda. Hasil

dari semua sumber kemakmuran dan tanah Negara Pasundan akan digunakan untuk Unie Indonesia-Belanda.²¹

Setelah pembacaan proklamasi masih ada pidato-pidato antara lain wakil dari wanita Sunda. R.A. Djuariah, Pengurus Partai Rakyat Pasundan Bogor R. Soeleiman, R. Hidayat dari Bandung, Moh. Abdulkarim dari Jakarta, wakil dari Tangerang H. Djoenaedi dan terakhir wakil dari Citeureup.

Setelah upacara proklamasi, diadakan pawai dari alun-alun ke tempat tinggal Presiden Priangan di Wastukencana. Pada tengah hari dilangsungkan konferensi pers. Dalam kesempatan ini Kartalegawa menyatakan bahwa dengan proklamasi Negara Pasundan tidak berarti ia akan menentang Republik Indonesia karena berdirinya Negara Pasundan berdasar pada pasal 3 dan 4 Perjanjian Linggajati dan nantinya akan berfederasi dalam negara Republik Indonesia Serikat. Kartalegawa juga membantah berita Aneta yang menyebutkan sambutan rakyat daerah Garut terhadap kunjungan Presiden Sukarno awal bulan April. Menurut Kartalegawa yang menyambut itu orang-orang Jawa.

Sore harinya diadakan resepsi di Hotel Preanger. Resepsi ini dihadiri tokoh-tokoh pemerintahan Negara Pasundan yang baru berdiri dan juga dihadiri oleh pejabat sipil dan militer Belanda, residen HTB (Hoofd Tijdelijk Bestuur) Priangan Klaassen, Mayor Jendral de Wall ber-

²¹ Ringkasan ini diambil dari Berita Indonesia, 5 Mei 1947.

sama istrinya.

Pada tanggal 4 Mei 1947 masyarakat Bogor juga mengikuti acara proklamasi Negara Pasundan di Bandung melalui siaran langsung radio yang kemudian disebar luaskan dengan pengeras suara bertempat di kediaman pengurus Partai Rakyat Pasundan Bogor. Setelah itu kemudian diadakan pawai ke Istana Bogor tempat kediaman kolonel A.A.J.J. Thompson untuk menyampaikan berita proklamasi. Pada malam harinya diadakan resepsi oleh Ny. Kustomo bertempat di kantor pengurus Partai Rakyat Pasundan Bogor yang dihadiri oleh anggota-anggota partai di Bogor, Status Muller (residen Bogor), dan kolonel A.A.J.J. Thomson.

Demikian munculnya Partai Rakyat Pasundan sampai proklamasi berdirinya Negara Pasundan 1947. Dalam bab berikut akan diuraikan akhir dari negara itu.



BAB IV

AKHIR DARI NEGARA PASUNDAN 1947

A. Reaksi Terhadap Proklamasi Negara Pasundan 1947

Proklamasi Negara Pasundan tanggal 4 Mei 1947 di Bandung mengundang banyak reaksi. Reaksi pertama datang dari pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dan orang Sunda yang menjadi pemimpin di Republik, antara lain: Wiranatakusumah (Ketua Dewan Pertimbangan Agung), Tirtawinata (Jaksa Agung), Kusuma Atmaja (Ketua Mahkamah Agung), Menteri Syafrudin Prawiranegara, Juanda, Wikana, Ir. Enokh (Wali kota Yogyakarta), Sewaka (Gubernur Jawa Barat), dan Kolonel Hidayat (Wakil Panglima Divisi Siliwangi).¹

Untuk mengimbangi kegiatan Partai Rakyat Pasundan, tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan Jawa Barat yang pernah aktif berusaha menghidupkan kembali organisasi tersebut. Maka pada tanggal 3 Mei 1947 Paguyuban Pasundan dinyatakan berdiri kembali dengan nama Paguyuban Pasundan Republik Indonesia. Tindakan mereka selanjutnya ialah berusaha mengaktifkan cabang-cabangnya di Jawa Barat antara lain di Cicalengka, Ciparay, Soreang, Cimahi, Cililin, Bogor, Ujungberung, Cianjur, Jakarta, Serang,

¹A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia jilid 4 (Bandung : Angkasa, 1975), h. 466.

Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, dan Sukabumi.

Bersamaan dengan proklamasi Negara Pasundan di Bandung, di Yogyakarta dibentuk sebuah panitia yang beranggotakan antara lain Ir. Juanda, R. Mohd. Enokh, Ahmad Netanegara, dan Natawiyoga. Panitia itu bertugas menyusun anggaran dasar organisasi Paguyuban Pasundan yang baru. Sebagai penasehat diangkat Prof. Mr. Dr. Kusuma Atmaja.²

Langkah-langkah yang ditempuh Paguyuban Pasundan antara lain:

1. Membuka sekolah-sekolah yang bernaung di bawah organisasi Paguyuban Pasundan dan mengubah rencana pelajarannya disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang telah berubah dan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia.
2. Membuka dan mengusahakan kembali bank-bank Paguyuban Pasundan, koperasi, badan sosial seperti dana pensiun, kematian dan rumah-rumah yang menampung serta mengurus fakir miskin.
3. Merumbuhkan kesadaran bahwa daerah Jawa Barat atau Pasundan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menentang dengan sekuat tenaga pembentukan Negara Pasundan oleh Kartalegawa.³

Pada tanggal 18 Mei 1947 Paguyuban Pasundan cabang Bandung beserta organisasi Gerakan Indonesia Muda, Badan Penasehat Indonesia dan Gabungan Warga Negara Indonesia (Gawanri), yang juga di Bandung, mengajukan resolusi menentang Negara Pasundan. Resolusi ini ditanda-

²Berita Indonesia, 5 Mei 1947.

³Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (Bandung : Pemda Kotamadya Bandung, 1981), h. 307.

tangani oleh Dr. R.M.S. Erwin atas nama Pengurus Badan Penasehat Indonesia, F. Watimena atas nama Gerakan Indonesia Muda, H. Saari atas nama Gawanri, dan Kaman Pagieh atas nama Paguyuban Pasundan cabang Bandung.

Pada tanggal 6 Mei 1947 keluarga besar Wiranatakusumah dari Garut mengirim pernyataan kepada media massa sebagai berikut:

Keluarga Wiranatakusumah terutama terdiri dari:

1. Raden Wiranatakusumah, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (sedang sakit di Garut).
2. Raden Male Wiranatakusumah, Kepala Kepolisian Karesidenan Priangan.
3. Raden Jusuf (mantu), Kepala Penilik Kepolisian Jawa Barat.
4. Raden Sunarjo (mantu), Pegawai Kantor Kabupaten Sumedang.
5. Raden Muharam Wiranatakusumah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Polisi di Yogyakarta.
6. Raden Acham Wiranatakusumah, Komandan Batalyon 26 Divisi Siliwangi.
7. Raden Memed Wiranatakusumah, Wakil Kepala PT Pengalengan.
8. Raden Abas Wiranatakusumah, anggota PT Cirebon.
9. Raden Maryam Wiranatakusumah, Pegawai Kantor Telepon Republik Indonesia Palembang.
10. Raden Slamet (mantu), anggota Angkatan Laut Republik Indonesia Cilacap.
11. Raden Darpo (mantu), pegawai Kementerian Penerangan Jakarta.
12. Paul Anwar Hakim, Pegawai Republik Indonesia dengan ini menyatakan:

Menolak sekeras-kerasnya adanya Negara Pasundan, dan berdiri mati-matian di bawah Pemerintah Republik Indonesia. Berpendirian: "Menuntut kesatuan kepulauan Indonesia". Garut, 6 Mei 1947, Keluarga Wiranatakusumah.⁴

Tentangan juga datang dari Sumatra Utara, karena

⁴A.H. Nasution, op. cit., h. 464, pernyataan ini dimuat dalam berbagai surat kabar antara lain : Kedaulatan Rakjat 7 Mei 1947 Merdeka, 7 Mei 1947.

walikota Medan dr. Manap adalah orang Sunda bekas anggota Paguyuban Pasundan. Dr. Manap beserta rakyat Sunda yang berada di Medan pada tanggal 5 Mei 1947 mengadakan demonstrasi anti Negara Pasundan Kartalegawa.⁵

Di Jawa Barat tantangan datang dari Keluarga Suria Kartalegawa di Garut, Kasultanan Cirebon, golongan agama, organisasi politik, pegawai pemerintah Republik, dan rakyat Jawa Barat.

Di Tangerang Partai Buruh Tangerang pada tanggal 1 Mei 1947 dalam peringatan Hari Buruh, yang dihadiri lebih kurang 2000 orang memprotes Partai Rakyat Pasundan, yang akan memproklamasikan Negara Pasundan. Setelah proklamasi Negara Pasundan, makin banyak penentang Partai Rakyat Pasundan. Pada tanggal 6 Mei di Kabupaten Cianjur para pamong praja membuat pernyataan tentang patuh pada Republik, dan mendesak agar pemerintah Republik mempercepat usaha pengembalian daerah seperti dalam Perjanjian Linggajati, serta tidak mengakui Partai Rakyat Pasundan. Pada tanggal 9 Mei 1947 protes datang dari daerah Cirebon. Rapat menentang Negara Pasundan di Cirebon didukung oleh Sultan Kasepuhan, Kanoman, dan Keceribonan yang dihadiri rakyat Cirebon. Mereka menentang Negara Pasundan dan membakar bendera Hijau-Putih, bendera Negara Pasundan.

⁵Rakjat, 23 Mei 1947.

Pada tanggal 10 Mei 1947 di Sumedang diadakan Rapat Besar Partai Sosialis dan dihadiri 54 wakil partai, Badan Jawatan Pemerintah, serta wakil rakyat. Rapat ini dimaksudkan pula untuk memprotes proklamasi Negara Pasundan. Pada hari yang sama juga berlangsung protes di Parung Panjang yang dihadiri sekitar 42.000 orang. Di Banten terjadi juga protes dari kaum ulama Islam yang mewakili 67 daerah di Jawa Barat. Pada tanggal 12 Mei 1947 protes terjadi di Sukanegara yang dihadiri 6.500-orang, 28 partai politik, dan jawatan pemerintahan. Protes juga terjadi di Rangkasbitung dan Tasikmalaya.⁶

Selain adanya pihak yang protes, ternyata ada juga yang mendukung berdirinya Negara Pasundan. Pada tanggal 5 Mei 1947 Abdul Moefachir Moehammad Heroeningrat seorang bangsawan dari Banten yang tinggal di Jakarta mengucapkan selamat terhadap proklamasi Negara Pasundan. Ia mengirim telegram kepada Ratu Belanda dan Letnan Gubernur Hindia Belanda, agar ia diakui sebagai Sultan Banten.⁷ Setelah diangkat menjadi Sultan Banten ia akan bekerja sama dengan Negara Pasundan, yaitu kerja sama antara Pasundan dan Banten.

Sementara itu untuk mengimbangi pihak yang pro Republik, Partai Rakyat Pasundan berusaha meluaskan pe-

⁶Dapat dilihat dalam Kedaulatan Rakjat, Merdeka, Berita Indonesia, Rakjat, Kemajuan Rakjat, antara tanggal 7 Mei sampai 23 Mei 1947.

⁷Rakjat, 23 Mei 1947.

ngaruh ke daerah Jakarta. Pencarian anggota baru dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah di daerah Krukut Jakarta. Anggota baru akan mendapatkan kartu kuning sebagai tanda anggota dan akan mendapatkan barang.

Bersamaan dengan propaganda Partai Rakyat Pasundan di Jakarta, pada tanggal 6 Mei 1947 tersebar pamflet yang bunyinya sebagai berikut:

Kami seluruh anggota Partai Rakyat Pasundan dengan ini menyatakan kesetiaan kami kepada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang terwujud dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhubung dengan itu, setiap anggota Partai Rakyat Pasundan adalah warga negara Republik Indonesia. Perihal dengan Partai Rakyat Pasundan dengan ini kami bubarkan seluruhnya. Berhubung dengan ini, maka "proklamasi berdirinya Negara Republik Pasundan" yang disiarkan pada tanggal 4 Mei 1947 ditarik kembali seluruhnya. Suria Kartalegawa.⁸

Presiden Sukarno kemudian membalas yang bunyinya sebagai berikut:

Amanat spesial kepada rakyat Pasundan. Saudara Rakyat Pasundan yang kucintai. Sejak terjadinya proklamasi "Negara Pasundan" oleh Suria Kartalegawa, maka saya menerima beratus-ratus kawat, mosi, resolusi dan sebagainya dari seluruh daerah Jawa Barat kepada Republik Indonesia, serta menolak adanya "Negara Pasundan". Memang sedari mulanya saja telah mengetahu, bahwa rakyat Pasundan tidak menghendaki negara lain, melainkan Negara Republik Indonesia yang tidak terpecah-pecah.

Sebagai tanda terima kasih saya kepada segenap rakyat Pasundan, dan untuk lebih mengeratkan lagi silaturahmi antara rakyat Pasundan dan Kepala Negara, maka saya bermaksud hendak mengunjungi saudara-saudara lagi, nanti dari tanggal 19-26 bulan ini.

Moga-moga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, serta Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka! Saudaramu Sukarno, Presiden, Yogyakarta 10 Mei 1947).⁹

⁸ Berita Indonesia, 7 Mei 1947; A.H. Nasution, op. cit., h. 465.

⁹ A.H. Nasution, loc. cit.

Sehubungan adanya pamflet pembatalan Negara Pasundan di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 1947 Suria Kartalegawa berpidato melalui radio Jakarta yang antara lain menjelaskan:

... dari Partai Rakyat Pasundan, rakyat Sunda telah bebas dan memproklamasikan Negara Pasundan yang bernilai sama dengan Republik Indonesia dalam Negara Indonesia Serikat. Proklamasi Negara Pasundan tanggal 4 Mei 1947 akan tetap menjadi pegangan rakyat Sunda. Pamflet yang beredar di Jakarta pada tanggal 6 Mei adalah pamflet palsu yang tidak dikenal penyebarannya. Negara Pasundan tetap bernilai sama dengan Republik Indonesia dan akan menjadi anggota Negara Indonesia Serikat...¹⁰

Untuk meyakinkan proklamasi Negara Pasundan, Partai Rakyat Pasundan pada tanggal 11 Mei 1947 mengadakan pertemuan massa di Kebun Binatang Jakarta. Pertemuan massa ini dihadiri sekitar 800 - 1000 orang yang datang dari Pasar Minggu, Citeureup, Pondok Gede, Cibinong, Kranji, Jatinegara dan Jakarta. Dalam rapat umum ini Kartalegawa berpidato yang antara lain berisi sebagai berikut:

... Negara Pasundan telah membebaskan rakyat Sunda dari penjajahan dan Negara Pasundan berdiri sesuai dengan Perjanjian Linggajati dari pasal 12, 14, dan 17. Pasal 12 menyatakan bentuk Indonesia adalah Federasi bukan kesatuan, sedangkan pasal 14 menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak-hak orang dan dari pasal 17 disebutkan dalam kerjasama Indonesia Belanda akan disertakan wakil-wakil yang ditunjuk oleh setiap pemerintah. Maka dari pasal-pasal Perjanjian Linggajati itu Pemerintah Republik Indonesia mengakui berdirinya Negara Pasundan.. ..mana yang kita pilih? Republik Sukarno buatan Jepang dan di sana kita tidak merdeka atau kita bekerja sama dengan Belanda, kita akan merdeka tidak di-

¹⁰ Rakjat, 10 Mei 1947.

bawah kekuasaan Republik ataupun Belanda.....¹¹
Rapat ini diakhiri dengan pembentukan cabang-cabang Partai Rakyat Pasundan di Jakarta dan sekitarnya.¹²

Dengan adanya proklamasi Negara Pasundan di Bandung, maka Presiden Republik Indonesia mengadakan kunjungan ke daerah Jawa Barat pada tanggal 21 Mei. rombongan Presiden juga diikuti wakil-wakil luar negeri yang terdiri dari 4 orang Belanda, dan wakil dari Rusia, Amerika, Perancis, serta Yugoslavia masing-masing seorang. Di beberapa tempat di Jawa Barat diadakan rapat raksasa.¹³ Kunjungan ini adalah untuk pertama kalinya ke daerah Priangan Timur, Priangan Utara, Tasikmalaya, Singaparna, Garut, Cicalengka, Sumedang dan Purwakarta. Rakyat di tiap desa datang ke tempat diadakan rapat raksasa, mereka bersemboyan: "satu bangsa, satu tanah air, satu pemerintahan Republik Indonesia", kita menolak Negara Pasundan ciptaan Kartalegawa dan kawan-kawan".¹⁴

Setelah rapat raksasa di Garut, ibu Kartalegawa yang sudah berusia 67 tahun menghadap Presiden. Ia menyatakan penyesalannya atas perbuatan anaknya yang tidak disetujuinya itu. Ia juga menyatakan bahwa segenap anak

¹¹Ibid., 12 Mei 1947.

¹²Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949, Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), h. 139.

¹³A.H. Nasution, op. cit., h. 466.

¹⁴Merdeka 24 Mei 1947.

cucunya yang lain tetap setia kepada Republik. Pernyataan ini juga disiarkan oleh Radio Republik Indonesia di Garut. Keluarga Kartalegawa kemudian menyampaikan resolusi kepada Presiden sebagai hasil rapat keluarga pada tanggal 28 Mei 1947 di Garut yang berisi:

(1) Menentang semua usaha yang mengakibatkan pecahnya persatuan rakyat dan kesatuan negara Republik Indonesia, dan (2) tidak mengakui adanya "Negara Kartalegawa", kedok imperialisme Belanda serta menyatakan kesetiaan seratus persen terhadap pemerintah Republik Indonesia. Resolusi ini ditandatangani oleh R.A.A. Suriamidjaja dan R.D.G. Kartadipura atas nama seluruh keluarga.¹⁵

Pernyataan Menteri Pertahanan mengenai Partai Rakyat Pasundan antara lain sebagai berikut:

Seluruh rakyat hendaknya insyaf, bahwa walaupun tidak ada perang, sekarang ini kita masih dalam keadaan perang yang tersembunyi (yang latent), berhubungan dengan tindakan-tindakan Belanda. Oleh karena itu kita harus selalu siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Gerakan Kartalegawa ini kita anggap sepi saja, tetapi yang memang berbahaya dalam hal ini adalah, bahwa di belakang gerakan Kartalegawa ini ada tentara Belanda.¹⁶

Pada tanggal 25 Mei 1947 para pejabat Republik di Jakarta membentuk sebuah Front Nasional untuk menentang pembentukan Negara Pasundan. Tetapi hal ini baru mereka lakukan setelah propaganda gerakan Pasundan di Jakarta berhasil mendapatkan dukungan dari sejumlah penduduk di kota itu. Front itu sendiri memusatkan perhatiannya pada kontra propaganda dan bukan secara aktif berusaha mem-

¹⁵Edi S. Ekadjati, Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat (Bandung : Depdikbud, 1980), h. 185, A.H. Nasution, op. cit., h. 468.

¹⁶A.H. Nasution, loc. cit.

bangun basis massa.¹⁷

Pemerintah Hindia Belanda menanggapi Proklamasi Negara Pasundan dengan sikap lunak. Van Mook jelas berpendapat bahwa gerakan Pasundan itu tidak layak diberi persetujuan resmi, namun ia melihat potensi di dalamnya, sehingga ia mengizinkan gerakan itu meneruskan kegiatannya.¹⁸

B. Aksi Partai Rakyat Pasundan di Bogor

Setelah kota Bogor diserahkan oleh Tentara Inggris kepada tentara Belanda, maka tentara Belanda kemudian berusaha menguasai Bogor sepenuhnya. Langkah yang ditempuh yaitu pertama-tama dengan mengubah tempat-tempat kedudukan tentara menjadi sektor-sektor penjagaan, sehingga penjagaan kota berada dalam kekuasaannya. Mereka bukan lagi menjaga keamanan konvoi, melainkan juga melancarkan tindakan-tindakan taktis guna menguasai seluruh kota dan sekitarnya. Langkah kedua, mereka mulai menuntut wilayah luas sekitar kota untuk dijadikan daerah Belanda, sehingga mendesak kekuatan Republik keluar kota. Ketiga, Belanda juga mencampuri urusan-urusan sipil dan pengangkutan, sehingga Belanda benar-benar menguasai kota Bogor.¹⁹ Selanjutnya Belanda

¹⁷Audrey R. Kahin, Pergolakan Daerah Pada Awal Revolusi (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1990), h.200.

¹⁸Robert Bridson Cribb, op. cit., h. 139.

¹⁹A.H. Nasution, op. cit., h. 344.

kemudian menyingkirkan pemimpin-pemimpin Republik dan mengangkat Statius Muller sebagai residen Bogor.

Pada bulan Maret 1947 Sewaka yang diangkat sebagai residen Bogor menemui Statius Muller membicarakan tentang pemulihan alat-alat sipil di Bogor. Pertemuan itu tidak membuahkan hasil, sebab Statius Muller menuntut Sewaka sebagai residen harus memberi laporan kepada Kepala Tentara Belanda tentang apa yang terjadi di daerah dan ia tidak diperkenankan mengadakan kunjungan ke Cianjur dan Sukabumi.²⁰

Setelah Belanda berkuasa penuh di Bogor, Mr. Kus-tomo, Sekretaris Partai Rakyat Pasundan mengangkat Su-haemi sebagai pimpinan Partai Rakyat Pasundan Bogor dan Supriyo sebagai sekretaris partai. Dari bulan Februari sampai April 1947 Partai Rakyat Pasundan berhasil menghimpun banyak anggota. Keberhasilan itu tidak lepas dari bantuan Belanda, baik dukungan moril maupun materiil.²¹ Pendekatan dilakukan lewat lurah dan penghulu. Dalam pi-dato-pidato propadanda, rakyat dijanjikan mendapat pem-bagian bahan makanan dan pakaian. Para anggota Partai Rakyat Pasundan diminta tanda tangannya, mereka mendapat kartu anggota sebagai tanda untuk mengambil bahan makan-an dan pakaian. Kecuali mendapatkan 6 liter beras se-

²⁰Sewaka, Tjorat-Tjaret dari Djaman ke Djaman, (Bandung : Visser, 1955), h. 90-

²¹Ariwiadi, "A Putsch by the Pasundan Peoples Party in Bogor on May 23 1947" dalam International Association of Historians of Asia, Sixth Congress, Yogyakarta. 26.- 30 Agustus 1974, h. 7.

minggu, mereka juga mendapat uang 6 rupiah dari Bagian Sosial. Namun pembagian beras dan uang itu hanya berlangsung satu bulan dari Februari sampai Maret 1947.²²

Menyingkirnya kekuatan Republik dari dalam kota sangat menguntungkan bagi gerak Partai Rakyat Pasundan.²³ Untuk mewujudkan kekuasaan Negara Pasundan yang diproklamasikan pada 4 Mei 1947, maka Partai Rakyat Pasundan merebut kekuasaan kota Bogor dari tangan Republik pada tanggal 23 Mei 1947. Perebutan kekuasaan dimulai pada dini hari dengan penculikan pejabat-pejabat Republik seperti Bupati Bogor Hardjadiparta dan Wakil Sekretaris-Bupati Bogor Harun Djajaningrat.²⁴

Pukul 05.00 sekitar 250 orang Partai Rakyat Pasundan yang didatangkan dari daerah Cimanggu, Parung, dan Depok menduduki kantor-kantor Republik seperti kantor Kabupaten, Kantor Pos, Kantor Pembagi Makanan, Bank Rakyat, dan Stasiun Kereta Api. Pegawai kantor tidak diperbolehkan masuk dan bendera merah putih tidak boleh dikibarkan. Kegiatan sehari-hari tidak dapat berjalan. Penjagaan kantor-kantor tersebut dilakukan oleh anggota partai dengan tanda pengenal bendera kecil hijau putih, yaitu bendera Negara Pasundan di bahunya.²⁶

²²Ibid., h. 7-8.

²³Ibid., h. 8.

²⁴Residen Bogor Supangkat juga akan diculik tetapi kebetulan ia tidak berada di rumah, A.H. Nasution, op. cit., h. 468.

Pada jam 09.30 delegasi Partai Rakyat Pasundan yang dipimpin Mr. Kustomo menemui Komandan Tentara Pendudukan A.A.J.J. Thomson di Istana Bogor. Mr. Kustomo melaporkan telah menduduki sejumlah bangunan milik Republik dan menyerahkan bangunan/kantor yang telah diduduki di bawah perlindungan Belanda. Pada hari itu juga Kolonel Thomson menempatkan tentaranya untuk menjaga bangunan dan kantor-kantor Republik sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan mengenai pendudukan itu.²⁵

Sejak tanggal 23 Mei 1947 Pemerintahan Republik Indonesia di Bogor diambil alih Partai Rakyat Pasundan, yang kemudian membentuk pemerintahan Pasundan Sementara di Bogor. R. Wirasempurna ditunjuk sebagai Bupati Bogor dan Mas Agung Kusumadinata sebagai Wali Kota Bogor. Selain itu dibentuk juga Komite Pekerja yang diketuai Mr. Kustomo, sedang anggotanya terdiri dari Suhemi, Achmad Djen, dan Sukarno. Partai Rakyat Pasundan berhasil menyusun pemerintahan Pasundan Sementara di seluruh Kabupaten Bogor kecuali di Kawedanan Leuwiliang dan Jasinga.²⁶

Pada tanggal 24 Mei 1947 dilangsungkan rapat Pusat Organisasi Rakyat Bogor yang pro Republik. Rapat itu menghasilkan keputusan sebagai berikut:

²⁵Ariwiadi, "A Putsch by the Pasundan Peoples Party in Bogor on May 23 1947", *op. cit.*, h. 9.

²⁶Ibid.

(a) Rakyat daerah Bogor hanya mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah, (b) Tidak mengakui Partai Rakyat Pasundan, karena Partai Rakyat Pasundan hanya alat Belanda saja, menolak sekeras-kerasnya tindakan Partai Rakyat Pasundan. (c) Menuntut pengembalian status quo Bogor se-kurang-kurangnya seperti pada waktu pergantian tentara pendudukan Inggris oleh Belanda. (d) Mencurahkan kepercayaan penuh kepada kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan soal Bogor secepatnya.²⁷

Pada tanggal 24 Mei itu juga datang delegasi Republik, antara lain Wali Kota Jakarta Suwirjo, dan Sekretaris Kementrian Penerangan Hamid Algadri.²⁸ Delegasi ini mengajukan protes terhadap Kolonel Thomson atas terjadinya perebutan kekuasaan di Bogor yang dilakukan Partai Rakyat Pasundan. Pertemuan delegasi Republik dengan Kolonel Thomson tidak menghasilkan keputusan karena Kolonel Thomson tidak bersedia membicarakan soal Bogor; karena itu adalah masalah politik, maka diluar kekuasaannya, van Mook-lah yang akan memberi keputusan.

Pada tanggal 25 Mei, 150 orang anggota Partai Rakyat Pasundan mengambil alih 3 stasiun kereta api Batutulis, Ciomas, dan Maseng. Disusul pada tanggal 26 Mei merebut stasiun Cilebut, Bojong Gede, Citajam, Depok, Pondok Cina, Lenteng Agung, Pasar Minggu, dan Kalibata.

Kantor-kantor yang telah diduduki Partai Rakyat Pasundan tidak dapat menjalankan pekerjaan pemerintahan,

²⁷A.H. Nasution, *op. cit.*, h. 471.

²⁸Merdeka, 27 Mei 1947.

lalu lintas kereta api dan Rumah Sakit Bogor yang kemudian juga direbut, terhenti kegiatannya. Oleh karena itu pada tanggal 31 Mei 1947 Residen Status Muller memanggil Residen Supangkat, Bupati Hardjadiparta, dan semua kepala jawatan untuk membicarakan dibukanya kembali kantor-kantor yang sejak aksi Partai Rakyat Pasundan ditutup. Status Muller mengharapkan agar pegawai-pegawai dapat bekerja kembali, tetapi kepala jawatan menolak dengan alasan mereka hanya akan masuk kantor bila ada perintah dari Perdana Menteri Syahrir, dan status Bogor dikembalikan seperti semula.

Sementara itu Partai Rakyat Pasundan membentuk Tentara Pasundan (Tentara PRP) di Cianjur. Di Jakarta juga dilakukan pembentukan tentara yaitu di Kampung Sumur, mereka berasal dari Lasykar Rakyat yang melarikan diri dari Karawang.²⁹

Untuk mengatasi kemacetan pemerintahan Bogor, maka disusun pemerintahan sementara yang terdiri dari Partai Rakyat Pasundan dan beberapa orang Republik. Maka ditunjuk 7 orang untuk memegang pemerintahan sementara. Mereka adalah R.A. Ranga Tirta Suyatna (Republik), M. Agus Kusumadinata (Partai Rakyat Pasundan), A. Mohende (Republik), R. Hadji Hasbullah (Republik), R. Soelaiman (Partai Rakyat Pasundan), M. Wisaksono Wirjodihardjo (Partai Rakyat Pasundan), dan R. Rusniputro (Republik).

²⁹A.H. Nasution, *op. cit.*, h. 474.

Sejak akhir Mei 1947, Belanda menduduki bangunan-bangunan milik Republik di Jakarta dengan dalih untuk menjaga keamanan dari serangan Partai Rakyat Pasundan.³⁰ Bangunan yang diduduki antara lain balai kota, stasiun kereta api Manggarai, Tanah Abang, dan Kota, Stasiun Listrik Ancol, Kantor Telepon Jatinegara, Gambir dan Kota. Di sini diadakan penjagaan oleh militer Belanda mulai jam 18.00 sampai jam 06.00 pagi, selama satu minggu.

Pada tanggal 1 Juni 1947 rombongan Partai Rakyat Pasundan dari Bogor datang ke Jakarta untuk mengadakan rapat di Kebayoran, tetapi tidak mendapat izin dari Belanda sehingga rapat tidak dapat dilaksanakan. Meskipun Partai Rakyat Pasundan tidak mengadakan aksi perebutan kekuasaan di Jakarta, tetapi protes terhadap Negara Pasundan juga terjadi di Jakarta.

Negara Pasundan hasil proklamasi Partai Rakyat Pasundan tidak dapat berkembang, tetapi kelangsungan Partai Rakyat Pasundan masih dapat dipertahankan. Pada bulan Juni 1947 di Jakarta berdiri NV Pasundan dipimpin oleh Moechsins Djajapawira dan Jusuf dengan mendapat modal 5 juta gulden dari Belanda. Dengan demikian Partai Rakyat Pasundan mulai membuka usaha dagang, tetapi masih tetap berfungsi sebagai partai politik. Maka, pada waktu konferensi-konferensi pembentukan Negara Pasundan yang baru, Partai Rakyat Pasundan juga dipilih sebagai wakil

³⁰Robert Bridson Cribb, op. cit., h. 141.

rakyat Jawa Barat.

C. Sekitar Pembentukan Negara Pasundan Tahun 1948

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer ke wilayah-wilayah Republik. Seluruh kota di Jawa Barat berhasil diduduki, kecuali daerah Banten. Agresi itu kemudian disusun dengan perjanjian Renville yang mengesahkan pendudukan Belanda atas Jawa Barat dan pengusiran kekuatan Republik dari wilayah itu. Untuk mengatur pemerintahan di Jawa Barat, Belanda mengangkat seorang Recomba (Regerings Commisaris voor Bestuurs Anglegenheden atau Komisaris Pemerintah untuk Urusan Administrasi, kira-kira sama dengan gubernur), dan yang mula-mula menduduki jabatan Recomba adalah Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo.

Setelah Agresi Militer Belanda, Negara Pasundan hasil proklamasi Partai Rakyat Pasundan tidak dapat berkembang lebih lanjut, tetapi Belanda semakin mantap untuk mendirikan negara di Jawa Barat. Dari gerakan Partai Rakyat Pasundan, Belanda berkesimpulan bahwa rakyat Jawa Barat sebenarnya dapat menerima didirikannya sebuah negara di Jawa Barat. Kegagalan Partai Rakyat Pasundan dalam mempertahankan Negara Pasundan disebabkan karena Kartalegawa bukan figur pemimpin yang baik dan tokoh-tokoh Partai Rakyat Pasundan bukan pemimpin politik yang terdidik. Maka van Mook

berusaha mendirikan negara federal di Jawa Barat yang berlandaskan pada konservatisme, moderasi politik dan administrasi yang efisien, dan sama sekali bukan nasionalisme soviniis Sunda sebagaimana yang dipropagandakan oleh Kartalegawa.³¹ Untuk merealisasikan pembentukan negara di Jawa Barat maka dilangsungkanlah konferensi-konferensi.

Konferensi Jawa Barat I diadakan tanggal 13 - 18 Oktober 1947 di Bandung. Konferensi itu diadakan dengan maksud untuk membentuk sebuah Contact Commisie atau Panitia penghubung yang diketuai oleh Hilman Djajadiningrat. Panitia itu mempunyai tugas mengadakan persiapan untuk suatu konferensi dari wakil-wakil Jawa Barat, supaya dapat dibentuk suatu susunan pemerintahan sendiri yang demokratis.³² Konferensi itu dihadiri 45 orang wakil Jawa Barat³³ yang ditunjuk oleh Belanda dari berbagai golongan yaitu gerakan politik, kelompok intelektual, petani, buruh, dan lain-lain.³⁴ Partai Rakyat Pasundan juga mendapat undangan untuk menjadi wakil daerah Jawa Barat. Sebenarnya Partai Rakyat Pasundan tidak se-

³¹Robert Bridson Cribb, op. cit., h. 163.

³²George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca and London : Cornell Up, 1970) h. 239.

³³A. Arthur Schiller, The Formation of Federal Indonesia (The Hague : W. van Hoeve Ltd, 1955) h. 160.

³⁴Wakil-wakil daerah yang datang dari Bogor, Sukabumi, Cianjur, Ciamis, Sumedang, Garut, Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, dan Cicalengka, 5 wakil dari Banten tidak hadir.

tuju diadakan konferensi untuk membentuk negara di Jawa Barat, karena menurut Partai Rakyat Pasundan Negara Pasundan sudah terbentuk tanggal 4 Mei 1947 yang diproklamasikan oleh Partai Rakyat Pasundan. Oleh karena itu Partai Rakyat Pasundan memboikot pembukaan Konferensi Jawa Barat I.³⁵ Wakil dari Partai Rakyat Pasundan kemudian hadir dalam konferensi tersebut.

Konferensi Jawa Barat II berlangsung di Bandung, tanggal 16 - 20 Desember 1947. Konferensi ini dihadiri 154 orang wakil yang terdiri dari 112 orang Indonesia, 18 orang China, 16 orang Belanda, 8 orang Arab.³⁶ Pada konferensi ini Recomba dipegang oleh Hilman Djajadiningrat, sedangkan ketua Panitia Penghubung dipegang oleh Djuwarsa.

Dalam Konferensi Jawa Barat II ini nampak ada tiga macam aliran: (1) golongan yang menghendaki pembentukan Negara Jawa Barat dengan segera; (2) golongan yang menghendaki suatu pemerintahan sementara untuk Jawa Barat; (3) golongan yang tidak menghendaki penetapan status kenegaraan sebelum diadakan prebisit.³⁷ Akhirnya ketiga aliran itu dapat disatukan, sehingga diputuskan dalam konferensi Jawa Barat III yang akan datang akan di-

³⁵Robert Bridson Cribb, op. cit., h. 164.

³⁶George McTurnan Kahin, op. cit., h. 141.

³⁷J.M.A. Tuhuteru, Riwayat Singkat Berdirinja Negara Pasundan (Djawatan Penerangan Pemerintah, tanpa tahun terbit), h. 7 - 11.

bentuk pemerintahan sementara untuk Jawa Barat dalam corak negara dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tanggal 20 Desember 1947, nama Panitia Penghubung diganti dengan Panitia Persiapan. Para anggotanya yang pada mulanya terdiri dari R. Hilman Djajadiningrat, R. Djuwarsa, R. Tirta Sujatna, R. Sunaria Kusumah, R. Sastranegara, kemudian ditambah dari aliran pro republik yaitu R. Otokusumah Subrata, R. Male Wiranatakusumah, dari golongan Cina yaitu Ir. Tan Hwat Taing; dari golongan Belanda yaitu Ir. E.D. Wermuth; dan dari golongan Arab yaitu Usman Aldjoffri. Panitia itu ditambah dengan seorang penasehat yaitu Suria Kartalegawa dan seorang juridisch adviseur Mr. R. Musa Surianatadjumena.³⁸

Konferensi Jawa Barat III dilangsungkan pada tanggal 23 Februari - 5 Maret 1948. Konferensi itu dihadiri 100 orang anggota yang terdiri dari 53 orang Indonesia; 14 orang Indonesia yang diangkat Recomba Jawa Barat dengan persetujuan Panitia Persiapan; 11 orang Belanda; 8 orang Cina; 3 orang Arab; dan 11 orang Panitia Persiapan. Meskipun dalam konferensi ini ada aliran yang tidak menyetujui pembentukan Negara Jawa Barat, tetapi karena suara aliran ini hanya 36 prosen dari seluruh jumlah anggota, maka pembentukan negara dapat berlangsung.³⁹

³⁸ Parlemen Pasundan Satu Tahun 1948 - 1949 (Bandung : Mascote, 1949), h. 13.

³⁹ A. Arthur Schiller, op. cit., 161.

Pembentukan Negara Pasundan ditetapkan dalam sidang konferensi yang diakui sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) Sementara pada tanggal 26 Februari 1948.

Dalam sidang Parlemen 24 April 1948, Wiranata Kusumah dinobatkan sebagai Wali Negara Pasundan. Dalam sidang Parlemen Pasundan Sementara tanggal 28 April 1948 diumumkan fraksi-fraksi yang ada di Parlemen Pasundan, yaitu:

Fraksi Nasional, Fraksi Indonesia, Fraksi Partai Rakyat Pasundan, Fraksi Tengah, Fraksi Kesatuan, Golongan I.E.V, Fraksi Kristen-Protestan, Fraksi Katholik, Golongan Arab, dan Golongan Cina. Sedangkan susunan anggota Parlemen Pasundan sebagai berikut:

Ketua : R. Tg. Djuwarsa
Wakil Ketua I : R. Suradiradja
Wakil Ketua II : R. Pandji Sunarto
Wakil Ketua III : Drs. Tan Eng Oen

Kepala-kepala pegawai Sekretaris Parlemen Pasundan:
Anjun Sekretaris : R. Sukmawidjaja
Kepala Bagian Umum : R.S. Gondosiswojo
Kepala Bagian Dokumentatie en Verslaggeving Sekretariat : R.D. Prawira Adiningrat
Kepala Bagian Keuangan: R.I. Djajakusuma
Kepala Bagian Wetgeving en Redactie: F.J.G. van Boeckel.

Anggota Parlemen Negara Pasundan:

1. Fraksi Nasional:

R.S. Suradiradja, R. Ahmad Atmadja, R.G. Suria Sumantri, R. Mashud, R.H. Djaliel, R.A. Natalegawa, R.C. Martahadiprawira, Agus Mugni, S. Wiratmara, R. Ating Atmadinata, Dr. R. Musa Sastranegara, R. Otto Kusumah Subrata, R. Tg. Tirtasujatna, dan H. Ranuwidjaja.

2. Fraksi Indonesia:

R. Sujoso, Endro, R. Oli Sutiadi, Abdulkarim, R. Tjakrakusumah (hasbulah), Dr. Hasan Natanegara, Darnudji, R. Agus, Buldan Djajawiguna, O. Djajasubita, R. Sudjalma Suradiradja, Prajitno, R. Pandji Sunario, Nana Saodana, Hamid

- Sutan, R. Suparno, R. Toha Reskohadisiswojo, Sumardjo al Suma'ardjo, Moh. Zain, Harun al Rasjid, R. Abunjamin Hudohadisukmo, Badar Wirjodisastro, Jusuf Kusumah, R. Sutarto, R. Sutia al Sutia al Sutiaatmadja, Sumarno, R. Uto Sumaatmadenda, Sumamihardja, I. Wirasupena, Satjadibrata, Sukarna, R.D. Sukardi dan R. Oni.
3. Fraksi Partai Rakyat Pasundan:
R.A.A. Moch. Musa Soeria Kartalegawa, M. Adjenar Djajaprawira, R.H. Moch. Djunaedi, R. Moch Muchsin Dendawidjaja.
 4. Fraksi Kesatuan:
R.T. Male Wiranatakusumah, M. Sutardja Sudawineta, R. Sumarna, R.H. Natapermana, R.T. Aria Wiriadiputra, R. Obos Judawinata, Abdul Hamid, R. Bustaman Anggadilaga, Saadiah Kartadipradja, R. Hollan Sukmadiningrat, M. Daeng Sutikna, R. Gunawan, Sulaeman Djajusman, Abdul Muin, Suhari Sumantri.
 5. Fraksi Tengah:
R. Mahar Martanegara, R.T.S. Nataamidjaja, M. Hilman Mangkudidjaja, Sulaeman, R.Tg. Djuwar-sa.
 6. Golongan I.E.V.
Drs. H. van Zuylen, Ir. F.M. Razouk Schulte, F. van Rhee, Mr. J.L.A. Visser, Ir. T.L.H. Dessauvagie, M.J. Waleson, G.S.J. Myne, dan J.P. de Haan.
 7. Protestant-Christenlijke Fractie:
Mr. C.C. van Helsdingen dan Ir. E.D. Wermuth
 8. Golongan Cina:
Lie Kian Kiem, S.H., Oei Kian Hong, S.H., Thung Bie Tjay, Drs. Tan Eng Oen, Tan Tjai Hoat, Thung Djie Loh, S.H., Ang Goan Hoat, dan Tan Kay Toeng.
 9. Golongan Arab:
Ali Alkateri, Umar Basalamay, dan Jachja Alaydrus.
 10. Fraksi Katholik:
G. Pastor.
 11. Golongan yang tidak masuk salah satu fraksi.
Prof. Dr. Ir. F.A. van Baren dan Sutadinata.⁴⁰

Langkah pertama yang dilakukan Parlemen Pasundan adalah memilih wali negara, dan yang terpilih sebagai wali negara adalah R.A.A.H.M. Wiranatakusumah. Pada

⁴⁰Parlemen Pasundan Satu Tahun 1948-1949, h. 31-93.

tanggal 14 April 1948 tersusunlah Kabinet Negara Pasundan, dengan susunan sebagai berikut:

Wali Negara Pasundan : R.A.A.H.H. Wiranatakusumah
Perdana Menteri merangkap Menteri dalam Negeri: R. Adil Puradiredja
Menteri Sosial : Dr. Bunjamin
Menteri Kemakmuran : R. Dendakusumah
Menteri Pekerjaan Umum dan Pengairan: Ir. Tan Hwat Tiang
Menteri Kehakiman : Suparman, S.H.
Menteri Pengajaran : R. Judakusumah
Menteri Kesehatan : Dr. Maskawan
Menteri Keuangan : Mr. P.J. Gerke.⁴¹

Dengan terbentuknya Parlemen dan Kabinet Pasundan, maka roda pemerintahan Negara Pasundan mulai berjalan dan kemudian nanti bergabung dalam Negara Indonesia Serikat.

Demikianlah reaksi terhadap berdirinya Negara Pasundan 1947, aksi perebutan kekuasaan Partai Rakyat Pasundan di Bogor, dan berdirinya Negara Pasundan 1948. Dengan demikian berakhirlah pembahasan tentang Negara Pasundan 1947. Berikut ini akan disampaikan kesimpulan dari uraian terdahulu.

⁴¹Ibid., h. 5-24.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

KESIMPULAN

Gerakan separatis di Jawa Barat yaitu berdirinya Negara Pasundan pimpinan Kartalegawa pada tahun 1947, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor situasi politik Republik Indonesia tahun 1945 - 1946. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di Jawa Barat terjadi pergolakan daerah yang mencoba melepaskan diri dari Republik. Hal ini masih ditambah kedatangan Belanda di Indonesia yang ingin kembali berkuasa, akibatnya terjadi pertikaian antara Republik dengan Belanda. Dalam pertikaian ini sebagian daerah Jawa Barat diduduki Belanda, terutama poros Jakarta-Bogor-Bandung. Kedua hal ini mengakibatkan ketidakstabilan pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat. Situasi ini masih diperburuk dengan peristiwa "Bandung Lautan Api" yang menyebabkan kekosongan kekuasaan Republik dalam kota Bandung.

Pertikaian antara Indonesia dan Belanda diusahakan diselesaikan dengan jalan diplomasi melalui beberapa kali perundingan. Hampir setiap kali perundingan mengalami kegagalan karena perbedaan konsepsi politis antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia dengan konsep negara kesatuan, sedangkan Belanda dengan konsep negara serikat. Untuk mewujudkan konsep negara serikat Belanda berusaha mendirikan negara-negara bagian. Usaha ini diawali

dengan dilangsungkannya Konferensi Malino yang kemudian disusul dengan pembentukan Negara Indonesia Timur dan daerah-daerah otonom di Kalimantan. Dalam perundingan Linggajati konsep negara serikat dapat disetujui kedua belah pihak. Pasal 3 dan pasal 4 Perjanjian Linggajati dijadikan dasar bagi pembentukan Negara Pasundan 1947.

Faktor kedua, yaitu adanya faktor penggerak, dalam hal ini Suria Kartalegawa yang menggunakan kesempatan ketidakstabilan pemerintah Republik Indonesia. Kekosongan kekuasaan Republik Indonesia di Bandung, dan hasil-hasil perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda. Ketiga hal itu dimanfaatkan oleh Suria Kartalegawa untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap Republik. Untuk memulai gerakannya Kartalegawa menekankan pada: (1) perbedaan adat istiadat dan kebiasaan hidup antara suku Jawa dan Suku Sunda. Perbedaan wawasan antara keduanya sudah ada sejak bangkitnya pergerakan kebangsaan ketika orang-orang Sunda dalam Budi Utomo memisahkan diri dan kemudian membentuk organisasi yang berciri khas Sunda yaitu Paguyuban Pasundan; (2) Pemerintah Republik Indonesia dikatakan sebagai pemerintahan yang Jawa Sentris, yang nampak denganuduknya orang-orang Jawa dalam Pemerintahan di Jawa Barat, yang oleh Kartalegawa hal ini disebutnya sebagai penjajahan suku Jawa terhadap suku Sunda.

Gerakan Kartalegawa bercita-cita mendirikan Negara Pasundan merdeka, terlepas dari kekuasaan Republik dan berfederasi dalam Negara Indonesia Serikat. Negara



Pasundan bernilai sama dengan Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Kalimantan. Cita-cita Kartalegawa mendapat simpati dari sebagian rakyat Jawa Barat terutama yang berada dalam daerah pendudukan Belanda dan jauh dari kekuasaan Republik.

Setelah ada partisipasi rakyat terhadap cita-cita mendirikan Negara Pasundan, dibentuklah partai politik sebagai alat mencapai cita-cita dan untuk mengorganisir massa pendukungnya, yaitu Partai Rakyat Pasundan. Partai Rakyat Pasundan inilah yang kemudian memproklamasikan Negara Pasundan pada tahun 1947.

Faktor ketiga, yaitu adanya bantuan dari tentara pendudukan Belanda. Gerakan pemisahan yang dilakukan Partai Rakyat Pasundan dapat terwujud dengan adanya faktor : kesempatan, tokoh penggerak, partisipasi rakyat, cita-cita, alat dan cara mencapai cita-cita, yang kemudian mendapat bantuan dari penguasa Belanda. Sesuai dengan politik federal van Mook yang akan mendirikan negara-negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia maka Belanda membantu gerakan pemisahan ini. Bantuan Belanda berupa: (1) memberi kesempatan kepada Partai Rakyat Pasundan untuk mencari anggota di daerah pendudukan Belanda; (2) memberi fasilitas untuk propaganda; (3) memberi dukungan dan persetujuan kepada Partai Rakyat Pasundan untuk memisahkan diri dari Republik dengan mendirikan Negara Pasundan di Jawa Barat, yang dikatakan sesuai dengan Perjanjian Linggarjati pasal 3 dan pasal 4.

Jawa Barat menurut Perjanjian Linggajati adalah daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia. Dengan demikian proklamasi Negara Pasundan 4 Mei 1947 di Bandung dapat dikategorikan sebagai gerakan pemisahan oleh sebagian rakyat Sunda dari pemerintah Republik Indonesia. Reaksi terhadap berdirinya Negara Pasundan bukan saja datang dari pejabat pemerintah Republik, tetapi juga dari tokoh masyarakat Jawa Barat yang berada di daerah Republik serta mayoritas rakyat di Jawa Barat, dan bahkan keluarga Suria Kartalegawa sendiri.

Negara Pasundan pimpinan Kartalegawa ini berhasil diproklamasikan, akan tetapi gagal dipertahankan kelangsungan hidupnya, bahkan waktu berakhirnyapun tidak jelas, karena tidak ada pernyataan resmi. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama yaitu keadaan di Jawa Barat, seperti yang diuraikan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa di Jawa Barat tidak ada kesatuan, yaitu adanya persaingan antara daerah Priangan yang berpusat di Bandung dan daerah di luar Priangan yaitu Banten. Kedua, banyak rakyat Jawa Barat yang tetap setia pada Republik dan tak berambisi mendirikan negara sendiri di Jawa Barat, akibatnya banyak rakyat Jawa Barat yang menentang Negara Pasundan. Ketiga, proses pendirian Negara Pasundan kurang mengikutsertakan tokoh masyarakat Jawa Barat sebagai wakil seluruh daerah Jawa Barat. Pendirian Negara Pasundan hanya merupakan ide dari satu partai saja yaitu Partai Rakyat Pasundan.

Dalam penerimaan anggota partai terdapat unsur keterpaksaan, bukan atas kehendak sendiri. Faktor keempat yaitu tokoh Partai Rakyat Pasundan, dapat dianggap sebagai penyebab kegagalan karena: (1) pribadi pendiri Partai Rakyat Pasundan, yaitu Suria Kartalegawa, yang ambisius akan pangkat dan sejak dulu dikenal sebagai bupati yang setia kepada Belanda; (2) tokoh pendukung Partai Rakyat Pasundan merupakan wajah-wajah baru yang tiba-tiba muncul dalam gelanggang pergerakan sehingga belum banyak dikenal dan belum mempunyai pengikut.

Berdirinya Negara Pasundan merupakan uji coba politik federal di Jawa Barat. Walaupun akhirnya Partai Rakyat Pasundan tidak berhasil mempertahankan berlangsungnya Negara Pasundan, tetapi Belanda berkesimpulan bahwa sebenarnya di Jawa Barat dapat didirikan suatu negara. Politik federal van Mook berhasil di Jawa Barat dengan berdirinya Negara Pasundan pada tahun 1948 dengan wali negara Wiranatakusumah yang didukung oleh Federasi Nasional.

Dengan diadakannya konferensi-konferensi di Jawa Barat sejak Oktober 1947, Negara Pasundan yang diproklamasikan oleh Partai Rakyat Pasundan tidak lagi terdengar beritanya, tetapi Partai Rakyat Pasundan masih ada dan ikut serta dalam pembentukan negara Pasundan 1948. Setelah Negara Pasundan yang baru berhasil dibentuk, maka Partai Rakyat Pasundan menjadi fraksi dalam Parlemen Negara Pasundan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Gde Agung, Ide
1985 Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
-
- 1983 Renville. Jakarta: Sinar Harapan.
- Anderson, B.R. OG.
1972 Java in Time of Revolution. Itacha: Cornell-U.P.
- Ariwiadi
1974 "A Putsch by the Pasundan Peoples Party in Bogor on May 23 1947" dalam International Association of Historians of Asia Sixth Congress. Yogyakarta.
- Bell, David V.J.
1973 Resistance and Revolution. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Cribb, Robert Bridson
1990 Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949 Pergulatan Antara Otonomi dan Hegemoni. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Daerah Istimewa Yogyakarta
1953 Yogyakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Djajusman
1986 Bandung Lautan Api. Bandung: Angkasa.
- Douverger, Maurice
1982 Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali.
- Ekadjati, Edi S.
1979 Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat. Bandung: Depdikbud.
-
- 1980 Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat. Bandung: Depdikbud.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto
1982 Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.
- Gottschalk, Louis
1975 Mengerti Sejarah. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hoffer, Eric
1988 Gerakan Massa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Kahin, Andrey R.
1990 Pergolakan Daerah Pada Awal Revolusi. Jakarta
Pustaka Utama Grafiti.
- Kahin, George McTurnan
1970 Nationalism and Revolution in Indonesia.
Ithaca and London: Cornell University Press.
- Kodam VI Siliwangi
1968 Siliwangi dari Masa ke Masa. Jakarta: Fakta
Mahjuma.
- Lindayanti
1984 Jawa Barat Setelah Perjanjian Linggajati.
Skripsi Fakultas Sastra UGM.
- Lucas, Anton E.
1989 Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Ma'mun Atmamihardja
1958 Sejarah Sunda Jilid 1. Bandung: Ganaco.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto
1984 Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai
Pustaka.
- Moedjanto, G.
1988 Indonesia Abad ke-20, Jilid 1. Yogyakarta:
Kanisius.
- Nasution, A.H.
1975 Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 4.
Bandung: Angkasa.
- Parlemen Pasundan Satu Tahun 1948-1949
1949 Bandung: Mascote.
- Pengurus Besar Partai Rakyat Pasundan
1948 Tudjuan Partai Rakjat Pasundan. Bandung :
Visser.
- Republik Indonesia Propinsi Djawa Barat
1953 Jakarta: Kementerian Penerangan Republik In-
donesia.
- Schiller, A. Arthur
1955 The Formation of Federal Indonesia. The Hague:
W. van Hoeve Ltd.
- Sejarah Daerah Jawa Barat Suatu Tanggapan dan Pembahasan
1972 Bandung: Pemerintah Daerah Jawa Barat.
- Sejarah Kabupaten Bandung
1974 Bandung: Pemerintah Daerah Jawa Barat Kabupa-
ten Bandung.
- Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan
1981 Bandung: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Bandung.

- Sewaka
1955 Tjorat-Tjoret dari Djaman ke Djaman. Bandung: Visser.
- Smail, John R.W.
1964 Bandung in The Early Revolution 1945-1949. New York: Cornell U.P.
- Smit, C.
1986 Dekolonisasi Indonesia. Jakarta: Pustaka Azet.
- The Liang Gie
1977 Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Indonesia. Yogyakarta: Karya Kencana.
- Tobing, K.M.L.
1986 Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggar - jati. Jakarta: Gunung Agung.
- Tuhuteru, J.M.A.
(tt) Riwayat Singkat Berdirinja Negara Pasundan.
(tk): Djawatan Penerangan Pemerintah.
- Wehl, David
1948 The Birth of Indonesia. London: George Allen and Unwin Ltd.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1

NASKAH RENCANA PERSETUJUAN (Penulisan disesuaikan dengan EYD)

PEMERINTAH BELANDA, dalam hal ini berwakilkan Komisi Jendral dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini berwakilkan Delegasi Indonesia.

Oleh karena mengandung keinginan yang ikhlas hendak menetapkan perhubungan yang baik antara kedua bangsa, Belanda dan Indonesia, dengan mengadakan cara dan bentuk bentuk yang baru, bagi kerja bersama dengan suka rela, yang merupakan jaminan sebaik-baiknya bagi kemajuan yang bagus, serta dengan kukuh-teguhnyanya dari pada kedua negeri itu, di dalam masa datang, dan yang membukakan jalan kepada kedua bangsa itu untuk mendasarkan perhubungan antara kedua belah pihak atas dasar-dasar yang baru, menetapkan mupakat seperti berikut, dengan ketentuan akan menganjurkan persetujuan ini selekas-lekasnya untuk memperoleh kebenaran dari pada majelis-majelis perwakilan rakyatnya masing-masing.

Pasal 1

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra.

Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak dan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu, supaya, selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah-daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3

Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia-Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah di musyawarahkan dengan lain-lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu dan terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4

(1) Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo¹⁾ dan Timur Besar²⁾, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.

(2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indo-

1) Kalimantan

2) Sulawesi, NTT, NTB dan Maluku, yang kemudian dikenal sebagai NIT (Negara Indonesia Timur).

nesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal 5

(1) Undang-undang Dasar daripada Negara Indonesia - Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentukan negara, yang akan didirikan daripada wakil-wakil sekutu lain-lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Indonesia Serikat itu, yang wakil-wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah-daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan-golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung jawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing-masing.

Pasal 6

(1) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membela-peliharakan kepentingan-kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia, akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia, yang dengan terbentuknya itu kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Hindia-Belanda, Suriname, dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persekutuan itu, yang terdiri dari satu pihak daripada kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Suriname dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Yang tersebut di atas ini tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian berkenaan dengan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal 7

(1) Untuk membela-peliharakan kepentingan - kepentingan tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda-Indonesia itu akan mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat-alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negara Indonesia Serikat; mungkin juga oleh majelis - majelis perwakilan rakyat negara-negara itu.

(3) Adapun yang akan dianggap kepentingan - kepentingan bersama itu ialah kerja bersama dalam hal perhubungan luar negeri, pertahanan dan seberapa perlu keuangan, serta juga hal-hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8

Di puncak Persekutuan Belanda-Indonesia itu duduklah Raja Belanda. Keputusan-keputusan bagi mengusahakan kepentingan-kepentingan bersama itu ditetapkan oleh alat-alat kelengkapan Persekutuan itu atas nama Baginda Raja.

Pasal 9

Untuk membela-pelihara kepentingan-kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negara Belanda, dan kepentingan-kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka

Pemerintah masing-masingnya kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10

Anggar-anggar Persekutuan Belanda-Indonesia itu antara lain akan mengandung juga ketentuan-ketentuan tentang:

- a) pertanggunggaan hak-hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan-jaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewajiban-kewajibannya yang satu kepada yang lain;
- b) hal kewarga-negaraan untuk warganegara Belanda dan warganegara Indonesia, masing-masing di daerah lainnya;
- c) aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat-alat kelengkapan Persekutuan itu tidak dapat dicapai semupakat;
- d) aturan cara bagaimana dan dengan syarat-syarat apa alat-alat kelengkapan Kerajaan Belanda memberi bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak atau kurang cukup mempunyai alat-alat kelengkapan sendiri;
- e) pertanggunggaan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak-hak dasar kemanusiaan dan kebebasan-kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11

(1) Anggar-anggar itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil-wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu.

(2) Anggar-anggar itu terus berlaku, setelah dibe-

narkan oleh majelis-majelis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing-masing.

Pasal 12

Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 13

Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan-tindakan, agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda-Indonesia itu dapatlah Negara Indonesia Serikat diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang-orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak-hak mereka yang dilakukan dan dikembalikan barang-barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15

Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh-bolehnya sesuai

dengan bentuk susunan menurut hukum negara, yang direka-kan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan-aturan undang-undang agar supaya, sementara menantikan berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda-Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa-bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16

Dengan segera setelah persetujuan ini menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan angkatan balatentaranya masing-masing. Kedua belah pihak akan bermusyawarah tentang sampai seberapa dan lambat-cepat -nya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja-bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17

(1) Untuk kerja-bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh tiap-tiap pemerintah itu masing-masingnya, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bilamana ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, akan menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi-delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan secara memutuskan, yang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil semupakat itu, diangkat

oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal Penutup

Persetujuan ini dikarangkan dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kedua-dua naskah itu sama kekuatannya.

Jakarta, 15 Nopember 1946.

Schermerhorn	Syahrir
Van Mook	Roem
Van Poll	Soesanto
De Boer	Gani

Sumber: R.M.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia, Linggarjati, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

